

**KINERJA PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN
PADA BADAN PENYULUHAN PERTANIAN
KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS**



Oleh

**HERMALASARI SAMALEHU
M 111 03 045**



Asal Data	Kehutanan
Banyaknya	1 Lembar
Marga	Samalehu
No. Inventaris	82
No. R. / No. P. / No. S.	SIKR. ICHOP

SAM
k

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi: : Kinerja Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan pada Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros

Nama Mahasiswa : Hermalasari Samalehu

Nomor Pokok : M111 03 045

Program Studi : Manajemen Hutan

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan Pada Program Studi Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Ir. M. Asar Sa'id Mahbub, MP

Pembimbing II

Ir. Abd. Rasyid Kalu, MS

Mengetahui,
Ketua Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin



Ir. Budirman Bachtiar, MS
NIP. 131 570 887

Tanggal Lulus: Mei 2008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmatnya dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kinerja Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Pada Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros” sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan, motivasi, saran atau petunjuk dari berbagai pihak.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Ir. M. Asar Said Mahbub, MP** sebagai pembimbing pertama dan **Bapak Ir. Abd. Rasyid Kalu, MS** sebagai pembimbing kedua yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan serta meluangkan waktunya selama penulis melakukan penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
2. **Bapak Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si** sebagai Penasehat Akademik
3. **Bapak Dr. Ir Muhammad Restu, MP** selaku dekan Fakultas Kehutanan dan **Bapak Ir. Budirman Bachtiar, MS** sebagai Ketua Program Studi Manajemen Hutan.

4. **Bapak Prof. Dr. Ir. Ngakan Putu Oka, Bapak Dr. Ir. Roland Alexander Barkey, dan Bapak Ir. H. Usman Arsyad, MS** selaku Tim Penguji atas kritik dan sarannya.
5. Segenap Dosen Program Studi Manajemen Hutan dan Program studi Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan.
6. Pimpinan dan seluruh Staf Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Selanjutnya Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Sahabat-sahabatku (**Irma, Mila, Lala, Ato, Mhi2 S.Hut, Nahda, Nho2, Danil S. Hut, Whi2, Vita S. Hut, Ikha, Nana, Itha, Jelin, Naning, Ado, Edi, Arif**) yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
- Teristemewa Rekan-rekan Penyuluh Kehutanan yang telah menjadi obyek penelitian sebagai responden. Semoga kebaikan yang mereka berikan akan menjadi amal jariah dan mendapat rahmat dari **ALLAHU SUBHANAHU WATAALA**, Amin.

Pada kesempatan ini pula Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada **Ayahanda Muhammad Samalehu, SH** dan **Ibunda Sitti Khalidjah Abbas** yang telah memberikan kasih sayang, doa restu serta dukungannya, juga kepada Kakak saya **Herfien Samalehu, ST** dan Adik saya **Hermiyanti Samalehu** serta seluruh keluargaku yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik moril maupun material.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri. Amin.

Makassar, Mei 2008

Penulis

ABSTRAK

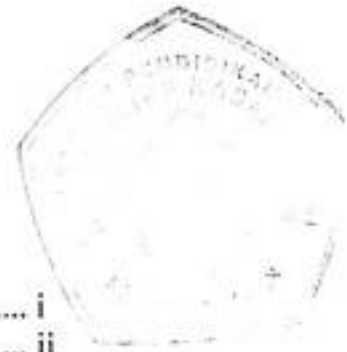
Hermalasari Samalehu (M111 03 045) Kinerja Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan pada Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, Dibawah bimbingan M. Asar Said Mahbub dan Abd. Rasyid Kalu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja program penyuluhan kehutanan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang ada pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi mengenai kinerja program penyuluhan kehutanan pada Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai bulan Desember pada Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros. Pengambilan data ini dilakukan terhadap 15 penyuluh kehutanan yang berada pada Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyuluh Kehutanan di kabupaten Maros, terdiri atas penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil dan Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli. Dalam pelaksanaan penyuluhan kehutanan, ditemui beberapa kendala antara lain alat peraga yang masih minim, bantuan biaya operasional yang belum tersedia sampai dengan sekarang serta semakin tertinggalnya keahlian penyuluh akibat kurangnya pelatihan dan pendidikan yang diikuti. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja penyuluhan Kehutanan di Kabupaten Maros, belum sepenuhnya berjalan dengan optimal.

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Tujuan dan Kegunaan	3

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Evaluasi dan Kinerja	4
B. Penyuluh Kehutanan	5
C. Penyuluhan Kehutanan	6
D. Pembangunan Penyuluhan Kehutanan	9
E. Kelembagaan Kehutanan	10
F. Manfaat Perencanaan	12
G. Tahapan Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan	13
H. Materi Penyuluhan	16
I. Pelaksanaan Program Penyuluhan	16
J. Tahapan Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	18

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat	21
B. Metode Pengumpulan Data	21
C. Analisis Data	22
D. Konsep Operasional	23

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Fisik Wilayah	25
B. Keadaan Sosial Ekonomi	26
1. Penduduk	26
2. Mata Pencaharian	28
3. Tingkat Pendidikan	28
4. Karakteristik Kelompok Tani	29

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan Penyuluhan Kehutanan	30
1. Program Penyuluhan	30
2. Rencana Kerja	32
3. Kelembagaan Penyuluhan Kehutanan	34
B. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan	35
1. Sasaran dan Materi Penyuluhan	35
2. Metode Penyuluhan	36
3. Kegiatan Penyuluhan Kehutanan	38
C. Monitoring dan Evaluasi	39

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	47
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Ketinggian wilayah Kecamatan Tompobulu dari Permukaan laut	26
2.	Jumlah Penduduk menurut Kelompok dan jenis kelamin di Kecamatan Tompobulu	27
3.	Luas desa, Jumlah rumah tangga, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut desa di kecamatan Tompobulu, kabupaten Maros	27
4.	Penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kecamatan Tompobulu	28
5.	Penduduk berdasarkan pendidikan di wilayah kerja BPP Tompobulu	28
6.	Pembagian Kelompok Tani di wilayah Kerja BPP Tompobulu, Kabupaten Maros	29
7.	Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan wilayah Kerja BPP Tompobulu	34
8.	Kelembagaan petani di Wilayah kerja BPP Tompobulu Kabupaten Maros	34
9.	Frekuensi kunjungan dan pertemuan kelompok Tani di wilayah kerja BPP Tompobulu, Kabupaten Maros	37
10.	Luas areal lahan Kegiatan Kehutanan di wilayah Kerja BPP Tompobulu, Kabupaten Maros	38
11.	Data penyuluh kehutanan pada Badan Penyuluhan Pertanian kehutanan dan ketahanan Pangan Kabupaten Maros	40
12.	Klasifikasi penyuluh kehutanan menurut jabatan pada Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan kabupaten Maros	42
13.	Tingkat Pendidikan Terakhir Penyuluh kehutanan	43
14.	Kondisi sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan pada badan penyuluhan pertanian kehutanan dan ketahanan pangan kabupaten Maros.....	45
15.	Tempat pertemuan kelompok tani di wilayah kerja penyuluhan tompobulu, kabupaten Maros	46

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	<i>Teks</i>	Halaman
1.	Identitas responden	51
2.	Rencana Kerja penyuluhan pertanian dan Kehutanan BPP/Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros	52
3.	Rekapitulasi Laporan Triwulan Kegiatan Penyuluhan kehutanan BPP Tompobulu kabupaten Maros	53
4.	Jumlah Angka Kredit kumulatif untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat penyuluh kehutanan tingkat terampil	55
5.	Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat penyuluh kehutanan tingkat ahli	56
6.	Rincian Kegiatan Kehutanan Tingkat Terampil dan angka Kreditnya.....	57
7.	Rincian Kegiatan Kehutanan Tingkat Terampil dan angka Kreditnya.....	68
8.	Bagan Struktur BPP Tompobulu, Kabupaten Maros	79
9.	Quesioner	80

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Kehutanan sekarang menganut paradigma baru yaitu Pembangunan Kehutanan yang bertumpu pada pendekatan ekosistem sumberdaya hutan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Hal ini berarti bahwa pembangunan kehutanan ke depan diarahkan untuk memberdayakan peran dan partisipasi aktif dari masyarakat dengan memperhatikan daya dukung sumberdaya hutan sehingga fungsi sosial, ekonomi, dan ekologinya dapat berfungsi optimal. Di sisi lain, pemberlakuan otonomi daerah berimplikasi kepada perlunya penyesuaian kebijakan di bidang kehutanan, khususnya penyuluhan kehutanan.

Sejalan dengan arah dan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan serta dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, maka telah dilaksanakan orientasi paradigma penyuluhan kehutanan yang semula dipahami sebagai proses alih informasi dan teknologi serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat, berubah pemahamannya menjadi suatu proses pemberdayaan masyarakat berbasis pembangunan kehutanan. Dengan demikian penyuluhan kehutanan pada hakekatnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, dan para pihak lainnya dalam pembangunan kehutanan yang merupakan investasi untuk mengamankan dan melestarikan hutan sebagai aset negara. Oleh karena itu penyuluh kehutanan memiliki peran strategis, baik dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemandirian

masyarakat, maupun dalam upaya pelestarian sumberdaya hutan. Kebijakan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di era otonomi mengharuskan para penyuluh kehutanan untuk lebih mampu menjalankan tugas dan fungsi-fungsinya, mampu memberdayakan petani untuk mandiri dan berusaha tani yang berorientasi pada agribisnis dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Untuk itu penyuluh kehutanan dituntut memiliki kinerja yang lebih baik, lebih profesional dan mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik.

Penyuluh Kehutanan yang terarah dan terencana dengan pendekatan partisipasi akan mendorong percepatan peningkatan kemampuan masyarakat, sehingga tercipta perkembangan ekonomi rakyat yang mandiri, tangguh dan berkelanjutan. Kondisi demikian menuntut adanya seorang penyuluh yang profesional, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, mampu berinteraksi dalam kehidupan masyarakat, dan memiliki kinerja yang tinggi sehingga dapat berperan sebagai fasilitator dan motivator bagi petani dan keluarganya atau kelompok masyarakat agar mereka memiliki kemampuan dan berpartisipasi untuk berperan nyata dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan dalam era otonomi daerah.

Salah satu faktor yang dapat menggambarkan kualitas seorang penyuluh adalah kinerja penyuluh itu sendiri di wilayah tempat kerjanya. Dengan demikian maka dilakukan penelitian untuk melihat kinerja program penyuluhan kehutanan serta kendala-kendala dalam pelaksanaan program penyuluhan pada Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros.



B. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kinerja program penyuluhan kehutanan pada Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang ada pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan pada Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi mengenai kinerja program penyuluhan kehutanan pada Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Evaluasi dan Kinerja

Dharma (1991), menekankan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja akan diketahui jika seseorang dapat menghasilkan suatu pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan organisasi. Sedang Wardoyo (2007) mengartikan evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi obyeknya, teknik-teknik pengukurannya dan metode analisisnya yang dirancang untuk membangun manfaat program dan proses pemerintahan. Dari sudut spesifikasi obyeknya berarti menilai hasil berbagai macam program-program yang dilaksanakan pemerintah sesuai dengan problema-problema yang dihadapi oleh masyarakat seperti misalnya dibidang kesehatan, pendidikan dan sebagainya apakah telah terlaksana dengan baik atau belum.

Menurut Firman (1990), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat penerapan sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan -kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan Mulyana (1999) mengartikan kinerja adalah segala bentuk

kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan badan milik negara dalam bentuk barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kinerja dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurus hal-hal yang diperlukan khalayak ramai. Hal-hal yang diperlukan tersebut meliputi : masalah perisinan, keamanan, ketertiban, kebersihan dan kebutuhan hidup yang baik.

Penjelasan kinerja yang dikemukakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada dasarnya senama dengan penjelasan terdahulu, hal ini dapat dilihat dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. Bila dihubungkan dengan kondisi kinerja penyuluh kehutanan saat ini pada dasarnya belum dilaksanakan, karena disamping issue penilaian kinerja ini relatif baru, juga yang menjadi sasaran penilaian akuntabilitas instansi pemerintah hanyalah proyek-proyek yang dilaksanakan, sementara yang bersifat kegiatan rutinitas penyuluh belum dilakukan evaluasi. Dalam arti kata model evaluasi penyuluhan yang dilakukan masih bersifat perbandingan antara rencana dan realisasi (Makmur, 2006).

B. Penyuluh Kehutanan

Puspadi (1999) menyebutkan bahwa penyuluh adalah seorang yang atas nama pemerintah atau lembaga penyuluh berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang/masyarakat sasaran penyuluh untuk menerapkan suatu inovasi.

Departemen Kehutanan (2000) menyebutkan bahwa untuk menjadi penyuluh kehutanan yang memiliki kinerja bagus yang berarti menuju pada profesional, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh penyuluh, yaitu:

1. Sifat dan perasaan organisasi penyuluh.
2. Pengertian dan pengetahuan tentang teknologi yang berkaitan dengan materi penyuluhan yang diprogramkan.
3. Kemampuan untuk menjelaskan program yang disampaikan
4. Kemampuan untuk mengorganisasikan masyarakat dan sumberdaya yang tersedia.

C. Penyuluhan Kehutanan

Penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar dari berbagai alternatif pemecahan masalah, walaupun tidak semua permasalahan dapat dipecahkan oleh penyuluh (Wardojo, 2007).

Mulyana (1999), menguraikan penyuluhan kehutanan adalah proses perubahan perilaku masyarakat, dunia usaha dan aparat pemerintah mengarah kepada pemahaman tentang manfaat pembangunan kehutanan agar terdorong untuk berperan aktif dan berdaya dalam posisinya sebagai pelaku. Sedangkan Departemen Kehutanan (2004) menyatakan penyuluhan kehutanan adalah transformasi teknologi dan penyampaian kebijakan serta informasi kehutanan pada kelompok masyarakat sasaran

melalui pendidikan non-formal untuk mengubah perilaku agar tahu, mau dan mampu menerapkan teknologi itu bagi pendidikan hidupnya serta secara sadar ikut aktif dalam pelestarian hutan dan sumber daya alam lainnya.

Kegiatan Penyuluhan Kehutanan yang efektif harus melalui perencanaan program penyuluhan yang baik. Dengan kata lain, penyuluhan yang baik harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Perencanaan Program Penyuluhan Kehutanan dapat diartikan sebagai : Suatu proses pemilihan dan menghubungkan fakta yang berhubungan dengan kegiatan memanfaatkan hutan, serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa mendatang, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan Penyuluhan Kehutanan yang diusulkan, untuk tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan (Wiratmadja, 1997).

Mengingat sangat luasnya tugas pokok para penyuluh kehutanan tersebut, maka pemerintah melalui keputusan tersebut membaginya dalam dua kelompok jabatan fungsional, yakni penyuluh kehutanan terampil dan Penyuluh Kehutanan ahli. Spesifikasi kedua jenis jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan tersebut adalah :

1. Penyuluh Kehutanan Tingat Terampil. Persyaratan minimal PNS yang menduduki jabatan ini adalah memiliki latar belakang Diploma tiga (D3) bidang Kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian dengan pangkat serendah-rendahnya II/b jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan terampil terdiri atas tiga tingkatan, yaitu:



- a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana (pangkat, golongan/ruang pengatur Muda Tingkat I, II/b sampai Pengatur Tingkat I/Iid).
 - b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan (pangkat, golongan/ruang : Penata Muda, III/a sampai Penata Muda Tingkat I/IIIb).
 - c. Penyuluh Kehutanan Penyelia (pangkat, golongan/ruang: Penata, III/c).
2. Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli. Jabatan fungsional ini dikhususkan pada sarjana dan atau pascasarjana, minimal berijazah sarjana/diploma IV bidang Kehutanan, Pertanian, peternakan atau perikanan dan pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a. Pada jabatan fungsional ini terdapat empat klasifikasi secara berjenjang, yakni :
- a. Penyuluh Kehutanan Pertama (Penata Muda, III/a sampai Penata Muda Tingkat I, III/b).
 - b. Penyuluh Kehutanan Muda (Penata, III/c sampai Penata Tingkat I, III/d)
 - c. Penyuluh Kehutanan Madya (Pembina, IV/a sampai Pembina Utama Muda IV/c).
 - d. Penyuluh Kehutanan Utama (Pembina Utama Madya, IV/d sampai Pembina Utama IV/e).

Meskipun terdapat perbedaan antara kedua jenis jabatan tersebut namun tidak ada hubungan hirarkis antara Penyuluh Kehutanan Terampil dengan Penyuluh Kehutanan ahli. Tetapi dalam operasional kegiatan, keduanya mempunyai hubungan kerja yang saling mengait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena menjadi satu kesatuan yang utuh. Penyuluh Kehutanan Terampil merupakan petugas terdepan

di lapangan dan berhak memperoleh petunjuk, bimbingan dan supervisi dari penyuluh Kehutanan ahli. Demikian pula Penyuluh kehutanan ahli, berkewajiban untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan dalam pertemuan dua mingguan (sesuai jadwal dan rencana kerja). Bekal yang diberikan menyangkut spesialisasi ataupun keahlian disiplin ilmunya (Adjid, 1994).

D. Pembangunan Penyuluhan Kehutanan

Konsep pembangunan Kehutanan adalah proses dinamis untuk meningkatkan kemampuan sektor pertanian dalam menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat (pasar), dengan menggerakkan segenap daya mampu manusia, modal, organisasi, teknologi dan pengetahuan untuk memanfaatkan dan sekaligus melestarikan sumberdaya alam guna menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup petani dan bangsa (masyarakat nasional). Untuk menjamin suatu strategi yang berhasil, maka diperlukan kebijaksanaan organisasi yang akan menyediakan semua fasilitas yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul selama implementasi. Kebijakan itu berkaitan dengan pelaksanaan, metode kerja, prosedur, peraturan-peraturan, formulir-formulir, dan segala sesuatu diperlukan untuk memberikan dorongan dan motivasi bagi karyawan dalam menyukseskan pencapaian sasaran organisasi. Kebijakan ini mengatur batas-batas apa yang dapat dan tidak dapat dikerjakan, tindakan-tindakan administratif mana yang boleh dijalankan. Dengan kata lain kebijaksanaan diperlukan untuk mencegah timbulnya tindakan

independen yang berarti memelihara ketergantungan pada satu yang lain, memperkecil keputusan-keputusan zig-zag dan praktek-praktek yang kontradiktif, dan yang terpenting dalam implementasi suatu kebijaksanaan harus memperhatikan syarat-syaratnya (Arikunto, 2001).

E. Kelembagaan Kehutanan

Lembaga mencakup bidang yang luas termasuk lembaga formal pemerintah dan non pemerintah serta informal (kelompok, asosiasi, dan interaksi antar individu, rumah tangga, serta kelompok masyarakat pedesaan). Gerakan pembangunan Kehutanan di Indonesia tidak lepas dari peran lembaga tersebut. Peranannya dalam program pembangunan kehutanan sebenarnya sulit untuk dipilah-pilah. Oleh karena itu, hilangnya peran dari salah satu institusi misalnya akan menggoyahkan pelaksanaan atau bahkan menyebabkan kegagalan program. Institusi formal yang diperkenalkan pemerintah di tingkat desa dibuat untuk membantu produsen kehutanan dalam memecahkan masalah produksi dan pemasaran termasuk di dalamnya lembaga penyuluhan, lembaga kredit, asosiasi pemakai air dan lembaga pemasaran (Baharsjah, 1994).

Berdasarkan keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri Pertanian tahun 1996, Badan Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) merupakan unit kerja organik penyuluhan pertanian yang kedudukannya berada dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dengan tugas menyelenggarakan penyuluhan pertanian di

wilayah kerjanya. Sedangkan Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan instalasi/sarana kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan atau kelipatan desa dalam satu wilayah administrasi kecamatan. Untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan penyuluhan, Badan Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program penyuluhan pertanian.
- b. Bimbingan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluh pertanian.
- c. Penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian.
- d. Pembinaan pengelolaan BPP
- e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan.
- f. Pemantauan dan evaluasi
- g. Sentra komunikasi pembangunan pertanian di kabupaten/kota
- h. Penyelenggaraan pelatihan/kursus bagi penyuluh pertanian dan petani-nelayan
- i. Melakukan penumbuhan dan pengembangan petani-nelayan
- j. Bimbingan penggunaan sarana usaha petani-nelayan
- k. Penyelenggaraan percontohan
- l. Pengelolaan perpustakaan
- m. Melakukan pengkajian dan penerapan teknologi pertanian
- n. Pemberian pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha.

F. Manfaat Perencanaan

Perencanaan tidak sekadar diadakan untuk meramalkan tujuan di masa depan. Tetapi, sekaligus juga membuat rumusan berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan tersebut, bagaimana mengkoordinasikan secara terpadu, bagaimana menghindari dan memperbaiki penyimpangan yang mungkin akan terjadi, serta bagaimana meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

Pembuatan perencanaan adalah suatu proses tersendiri, sedang untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkannya, adalah fungsi pengawasan, dan fungsi-fungsi manajemen yang lain. Perencanaan sekali lagi sangat diperlukan bagi fungsi-fungsi manajemen yang lain terutama untuk keperluan pengawasannya. Oleh karena itu, adanya perencanaan akan banyak memberikan manfaat bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam hal :

- a. Merangsang dan menjamin konsistensi serta keterpaduan kegiatan yang dilaksanakan
- b. Membantu menghindari dan mengoreksi atau menyembuhkan terjadinya krisis.
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan yang biasanya "sangat mahal".
- d. Perencanaan yang dilengkapi dengan garis-garis kebijaksanaan yang mantap, akan membantu para manajer dan unsure pimpinan yang lebih rendah untuk melakukan pendelegasian wewenang.
- e. Perencanaan adalah pedoman pelaksanaan pengawasan.
- f. Perencanaan akan menambah efisiensi ekonomi

G. Tahapan Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan

Dalam kegiatan Penyuluhan Kehutanan, penyusunan program merupakan langkah awal yang selanjutnya diikuti dengan tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Ketiga tingkatan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh setiap penyuluh (Syamsuddin, 1987).

Menurut Mardikanto (1993), tahapan penyusunan program Penyuluhan Kehutanan dibagi atas beberapa langkah yaitu :

Langkah 1. Tujuan, Kebijakan dan Prosedur.

Jika secara administratif, kegiatan Penyuluhan Kehutanan telah ditetapkan pada suatu daerah, maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Tetapan wilayah kerja Penyuluhan Kehutanan
- b) Menentukan tujuan yang ingin dicapai
- c) Mengatur agar setiap petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan di dalam suatu organisasi dapat mengetahuinya.
- d) Menjelaskan kebijakan yang ditempuh oleh organisasi yang akan melaksanakan Penyuluhan Kehutanan.
- e) Susun bagan sistem dan prosedur yang harus diikuti oleh para staff.

Langkah 2. Kumpulkan Informasi Yang Melatarbelakangi Program Penyuluhan Kehutanan

Pengumpulan Informasi yang melatar belakangi program Penyuluhan Kehutanan yang akan dilaksanakan melalui pertemuan umum, kunjungan kepada tokoh-tokoh masyarakat, suvey, membagikan daftar pertanyaan atau diskusi dengan kelompok-kelompok tani hutan dan tokoh masyarakat yang memiliki posisi penting di mata masyarakat.

Langkah 3. Pilihlah Panitia Perencana dan Diskusikan Rencana Kerja

Jika pada suatu daerah sudah ada organisasi penyuluhan, maka dapat dipergunakan organisasi rencana Penyuluhan Kehutanan yang telah ada, tetapi pada suatu organisasi baru, maka petama-tama haus diputuskan terlebih dahulu apakah dalam menyusun program penyuluhan akan bekerja dengan bentuk kelompok, maka anggota-anggota yang terpilih selanjutnya berkumpul untuk mendiskusikan informasi yang menjadi latar belakang program Penyuluhan Kehutanan, guna mengembangkan suatu rencana kerja dengan memanfaatkan saran-saran mereka.

Langkah 4. Konsultasi Dengan Para Ahli dan Kumpulkan Informasi Hasil Penelitian

Untuk menjamin agar prosedur teknis yang akan dilaksanakan sudah benar, maka informasi yang melatarbelakangi program penyuluhan perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan para ahli atau para peneliti. Di samping itu diskusi ini juga dipandang penting untuk mengetahui apakah tersedia informasi di masing-masing lembaga tersebut di atas yang dapat dimanfaatkan, sebelum menyusun program Penyuluhan Kehutanan.

Langkah 5. Menyusun Rencana Kerja

Rencana kerja ini harus dibuat oleh petugas yang akan melaksanakan penyusunan program Penyuluhan Kehutanan. Rencana kerja tersebut haruslah mencakup informasi yang melatarbelakangi penyusunan program penyuluhan.

Langkah 6. Persetujuan dan Revisi.

Diskusi program kerja yang telah disusun oleh Penyuluh Kehutanan dengan penduduk setempat dan dapatkan persetujuan dari mereka. Demikian juga persetujuan dari pejabat setempat. Jika program kerja Penyuluhan Kehutanan tersebut kurang memenuhi keinginan dan kurang memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar hutan, dapat disempunakan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Langkah 7. Libatkan Orang Lain

Untuk memperkenalkan program kerja Penyuluhan Kehutanan kepada masyarakat setempat, sebarkan program kerja penyuluhan yang telah disusun oleh para Penyuluh Kehutanan dan libatkan setiap orang serta berikan tanggung jawab tertentu kepadanya. Dalam melibatkan orang ini, hendaknya diupayakan agar mereka merasa ikut berperan serta didalam penyusunan program penyuluhan, walaupun mereka sebenarnya tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan program penyuluhan.

H. Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan pada hakekatnya merupakan segala pesan yang ingin dikomunikasikan oleh seorang penyuluh kepada masyarakat sarasannya. Dengan kata lain, materi penyuluhan adalah pesan yang ingin disampaikan dalam proses komunikasi pembangunan. Sehubungan dengan itu, maka pesan yang disampaikan dalam setiap proses komunikasi dapat dibedakan dalam bentuk pesan yang bersifat: informatif, persuasif dan intertainment. pesan yang disampaikan dalam proses penyuluhan harus bersifat inovatif yang mampu mengubah atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan ke arah pembaharuan dalam segala aspek kehidupan masyarakat sasaran, demi selalu terwujudnya perbaikan-perbaikan mutu hidup setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan (Departemen Kehutanan, 1996)

I. Pelaksanaan Program Penyuluhan

Pelaksanaan program sebenarnya merupakan kegiatan Penyuluhan Kehutanan, dalam hal ini seorang Penyuluh Kehutanan langsung melaksanakan apa yang sudah ditetapkan dalam rencana kegiatan (Mardikanto, 1993)

Menurut Syamsuddin (1987), apa yang dikerjakan oleh seorang penyuluh senantiasa harus menurut rencana. Setiap kegiatan harus benar-benar tepat menurut jadwal kegiatan. Tepati apa yang sudah dijanjikan, terutama menyangkut kegiatan yang sebelumnya sudah dijanjikan kepada petani. Misalnya menurut jadwal kerja dalam kegiatan demonstrasi penyuluhan akan hadir ditengah-tengah petani, tetapi

berhalangan hadir. Penyuluh harus cepat-cepat menyampaikan alasan mengapa berhalangan hadir, atau sebelumnya memberitahukan hal ini kepada petani yang akan didatangi. Pemenuhan janji yang sudah diberikan kepada petani adalah modal dasar seorang penyuluh untuk mendapat kepercayaan dan perhatian dari petani. Selain pemenuhan janji tersebut ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan oleh seorang penyuluh yaitu:

1. Petani sebenarnya bukan bawahan dan bukan murid seorang penyuluh, petani tidak dapat dikenai sanksi dan tindakan jabatan.
2. Dalam kegiatan, penyuluhan harus dapat membawa petani kearah kerja atau kegiatan secara demokratis, jangan menganggap masyarakat desa/petani tidak tahu apa-apa.
3. Kegiatan penyuluh kehutanan merupakan proses yang terus menerus, dengan demikian setiap saat seorang Penyuluh kehutanan bersedia melayani kebutuhan petani, yang berarti setiap saat Penyuluh Kehutanan harus belajar agar tidak ketinggalan wawasan oleh petani.
4. Perhatikan dasar-dasar yang harus dipegang oleh seorang Penyuluh Kehutanan, menurut syarat dan pengangan kerja.

Agar setiap kegiatan lebih terarah, maka yang harus menjadi pegangan adalah program penyuluhan yang termasuk didalamnya rencana kegiatan yang disusun atas dasar kenyataan para petani dan daerahnya.

J. Tahapan Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan

Menurut Mulyana (1999) tahapan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Rencana merupakan tahap awal pelaksanaan suatu kegiatan termasuk dalam penyelenggaraan penyuluhan. Banyak pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan yang harus diambil agar diperoleh penyuluhan yang efektif. Untuk itu, penyuluhan menuntut perencanaan yang sistematis dengan didukung oleh pengambilan-pengambilan keputusan yang seirama.

Dalam penyusunan rencana pelaksanaan penyuluhan, seorang penyuluh harus menetapkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut

- a. Tujuan yang hendak dicapai
- b. Kelompok sasaran
- c. Isi pesan penyuluhan
- d. Metode penyuluhan yang akan digunakan
- e. Organisasi untuk melaksanakan kegiatan

2. Pelaksanaan

Setelah tersusunnya rencana penyelenggaraan penyuluhan maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan penyuluhan. Namun karena kegiatan-kegiatan penyuluhan itu bersifat luas dan kompleks maka sebelum pelaksanaan langsung kegiatan masih perlu mengecek ulang langkah-langkah sebagai berikut :

a. Observasi wilayah kerja

Observasi wilayah kerja adalah mengumpulkan data dan informasi dasar yang menggambarkan secara umum potensi wilayah kerja yang erat kaitannya dengan penyuluhan kehutanan.

b. Pemilihan metode penyuluhan

Metode penyuluhan kehutanan adalah cara mempertemukan penyuluh dengan masyarakat sasaran penyuluhan yang dapat dikelompokkan dengan tiga pendekatan yaitu : (a) pendekatan perorangan, (b) pendekatan kelompok dan (c) pendekatan massal.

c. Survey kebutuhan

Survey kebutuhan atau lebih dikenal dengan identifikasi faktor penentu harus dilakukan dengan hati-hati karena survey ini merupakan kunci awal keberhasilan program penyuluhan.

3. Pembinaan

Pembinaan pada penyelenggaraan penyuluhan kehutanan meliputi dua sasaran yaitu :

a. Pembinaan terhadap masyarakat, dan

b. Pembinaan terhadap pengelola penyuluhan dan penyuluh secara instansional

4. Monitoring dan evaluasi

Monitoring adalah alat manajemen yang sangat strategis dalam siklus keseluruhan kegiatan/proyek/program. Dalam tahap ini dibutuhkan hal-hal sebagai berikut :

- Penetapan bidang apa yang perlu dimonitor dan dievaluasi
- Menetapkan indikator
- Sistem pengumpulan data
- Tabulasi data dan analisisnya



III. METODE PRAKTEK

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2007. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan, dengan wilayah kerja kajian Penyuluhan Kehutanan adalah di Wilayah Kerja BPP Tompobulu, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan.

B. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi yang dikumpulkan terbagi atas :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara menggunakan questioner dengan metode sensus terhadap penyuluh kehutanan yang ada pada Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, meliputi Identitas penyuluh yang mencakup jumlah dan tingkat pendidikan penyuluh kehutanan
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain dokumentasi/tulisan dalam laporan – laporan pada kantor yang bersangkutan. Pengambilan data sekunder difokuskan pada data yang berhubungan dengan realisasi program penyuluhan kehutanan.

C. Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis melalui analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini akan mendeskripsikan kegiatan penyuluhan kehutanan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja program penyuluhan kehutanan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pelaksanaan program penyuluhan kehutanan maka aspek-aspek program Penyuluhan Kehutanan yang dinilai meliputi:

- A. Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
 - a. Program Penyuluhan Kehutanan
 - b. Rencana kerja Penyuluhan
- B. Pelaksanaan penyuluhan Kehutanan
 - a. Sasaran dan Materi Penyuluhan
 - b. Metode Penyuluhan
 - c. Kegiatan Penyuluhan
- C. Monitoring dan Evaluasi

D. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah batasan operasional dari berbagai istilah yang berhubungan dengan penelitian dan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman mengenai pengertian dari istilah-istilah tersebut, maka berikut ini ada batasan pengertian dari beberapa istilah:

- a. Kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melakukan tugas-tugas yang didasarkan atas dasar kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.
- b. Penyuluh adalah seseorang yang memberikan suluhan kepada kelompok tani.
- c. Penyuluhan adalah suatu cara atau metode dalam menyampaikan suatu program kerja pada suatu kelompok atau lembaga masyarakat.
- d. Penyuluh kehutanan adalah seseorang yang mempengaruhi keputusan inovasi klien menuju suatu arah yang diinginkan oleh suatu lembaga perubahan.
- e. Penyuluhan Kehutanan adalah upaya alih teknologi kehutanan melalui pendidikan luar-sekolah yang ditujukan kepada petani dan kelompok masyarakat lainnya, untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, ketrampilan, dan kemampuannya dalam memanfaatkan lahan miliknya, pengamanan, serta pelestarian sumberdaya alam.
- f. Kelembagaan Kehutanan adalah badan hukum atau sosial dan ekonomi yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan kehutanan.

- g. Kebijakan pembangunan kehutanan adalah berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berhubungan dengan kehutanan baik Keppres, Keputusan Menteri atau peraturan daerah.
- h. Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang penyuluh kehutanan dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan penyuluh Kehutanan.
- i. Pendidikan adalah tingkat pendidikan formal terakhir yang dimiliki oleh penyuluh.
- j. Program kerja adalah metode atau cara yang terorganisir dalam mencapai suatu hasil kerja.
- k. Programa adalah rencana kerja kelompok jabatan fungsional penyuluh kehutanan, memuat keadaan karakteristik wilayah kerja, permasalahan, metode dan teknik penyuluhan, rencana detail kegiatan dan lokasi sasaran, rencana anggaran serta sarana/alat bantu penyuluhan kehutanan.
- l. Responden adalah orang yang diwawancarai atau dimintai keterangannya.

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan fisik Wilayah

Letak Geografis dan Topografi

Kabupaten Maros terletak dibagian barat Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Maros 1.619,12 km² atau 16.1912 Ha. Secara Administrasi Pemerintah menjadi 14 Kecamatan dan 103 Desa/Kelurahan.

- a. Sebelah Utara berbatasan : Dengan Kabupaten Pangkep
- b. Sebelah Selatan berbatasan: Dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa
- c. Sebelah Timur berbatasan : Dengan Kabupaten Bone
- d. Sebelah Barat berbatasan : Dengan Selat Makassar

Kecamatan Tompobulu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Maros. Keadaan geografi Kecamatan Tompobulu merupakan daerah bukan pantai yang sebagian besar berbentuk dataran. Dari delapan daerah wilayah administrasi yang ada, enam desa mempunyai topografi dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 500 meter dan dua desa dengan topografi dataran tinggi yaitu Desa Bonto Manurung dan Desa Somba dengan ketinggian rata-rata 300 meter diatas permukaan laut.

Tabel 1. Ketinggian wilayah Kecamatan Tompobulu dari permukaan laut

No	Desa/Kelurahan	Tinggi dari Permukaan Laut (m)	Luas Ha
1.	Benteng Gajah	500	2403
2.	Pucak	500	1776
3.	Toddolimae	500	3213
4.	Tompobulu	500	4553
5.	Bontomanai	500	4055
6.	Bontomatinggi	500	2367
7.	Bontosamba	700	9198
8.	Bontomanurung	700	1200
Jumlah		4400	28765

Sumber : Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, 2007

Luas Kecamatan Tompobulu sekitar 287,66 km² atau 28766 Ha. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cenrana dan Kabupaten Bone, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanralili, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Simbang dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Jarak antara desa dengan pusat pemerintahan Kabupaten cukup jauh yaitu desa terdekat dengan jarak 18 km.

B. Keadaan Sosial Ekonomi

1. Penduduk

Penduduk Kecamatan Tompobulu sebanyak 13.986 jiwa, yaitu laki-laki 7.083 jiwa dan perempuan 6.903 jiwa. Penduduk terbanyak berada pada desa Bonto Masamba sebanyak 2.551 jiwa dan terkecil sebanyak 1.132 jiwa berada pada desa Bonto Matinggi. Dengan jumlah Rumah tangga sebanyak 2.607 dengan kepadatan penduduk sebesar 528 jiwa/km², mayoritas warganya berasal dari suku/etnis Bugis-Makassar. Mayoritas penduduk Kecamatan Tompobulu memeluk Agama Islam

dengan jumlah 13.593 jiwa, selebihnya pemeluk Agama Khatolik 35 jiwa, protestan 65 jiwa. Jumlah sarana ibadah masing-masing seperti masjid 33 buah, longgar/Surau/Musallah 13 buah dan gereja sebanyak 1 buah.

Struktur umur penduduk Kecamatan Tompobulu baik laki-laki maupun perempuan terbanyak tersebar mulai pada kelompok umur antara 0-4 tahun sampai dengan 30-34 dan mulai menurun pada kelompok umur 65.

Tabel 2. Jumlah penduduk menurut kelompok dan jenis kelamin di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros.

No	Umur tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	901	838	1.739
2.	5 – 24	3.118	2.934	6.057
3.	25 – 34	1.319	1.988	2.807
4.	35 – 44	1.059	1.079	2.138
5.	45 – 54	307	301	608
6.	55 – 64	275	156	431
7.	65 ke atas	104	102	206
	Jumlah	7.083	6.903	13.986

Sumber: Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, 2007

Tabel 3. Luas Desa, jumlah rumah tangga, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut desa di Kecamatan Tompobulu, kabupaten Maros.

No	Desa	Luas (km ²)	Rumah tangga	Penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
1	Benteng Gajah	24.03	256	1875	78
2	Pucak	17.76	472	1989	118
3	Tompobulu	45.54	363	2031	56
4	Toddolimae	32.13	192	1355	63
5	Bontomanai	40.55	195	1209	48
6	Bontomatinggi	23.67	252	1132	49
7	Bontomanurung	12.00	245	1944	101
8	Bontosamba	91.98	632	2551	15
	Jumlah	287.66	2.607	13.986	528

Sumber : Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, 2007

2. Mata Pencaharian

Tabel 4. Penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros

No	Pekerjaan	Jumlah orang
1	Petani	3.147
2	Pegawai Negeri	54
3	Pegawai swasta	374
4	ABRI	94
5	Pedagang	48
6	KK tani	2832

Sumber : Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, 2007

3. Tingkat Pendidikan

Tabel 5. Penduduk berdasarkan Pendidikan di Wilayah Kerja BPP Tompobulu, Kabupaten Maros.

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	2.328	2.329	4.657
2	Tamat SD	1.525	1.344	2.869
3	Tamat SLTP	1.015	1.229	2.244
4	Tamat SLTA	825	1.425	2.250
5	Diploma	813	361	1.174
6	Perguruan tinggi	577	215	792
	Jumlah	7.083	6.903	13.986

Sumber : Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, 2007

Pada umumnya penduduk usia sekolah yang akan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini perguruan tinggi/universitas pada umumnya mereka melanjutkan ke kota Makassar atau ke kecamatan tetangga yaitu Kecamatan Mandai serta Kecamatan Turikale. Karena keberadaan perguruan tinggi/Universitas di kecamatan Tompobulu belum tersedia.

4. Karakteristik Kelompok Tani

Kelompok tani yang ada di wilayah Kerja BPP Tompobulu terdiri atas Kelompok Tani pemula sebanyak 28 Kelompok, kelompok tani lanjut sebanyak 15 kelompok, kelompok tani madya sebanyak 8 kelompok, dan kelompok tani utama sebanyak 2 kelompok.

Berdasarkan data hasil penilaian kelompok tani, maka jumlah kelompok tani yang ada di wilayah kerja BPP Tompobulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Pembagian Kelompok Tani di Wilayah Kerja BPP Tompobulu, Kabupaten Maros, 2007.

No	Jenis Kelompok tani	Jumlah
1.	Kelompok Tani Pemula	34 Kelompok
2.	Kelompok Tani Lanjut	15 Kelompok
3.	Kelompok Tani Madya	8 Kelompok
4.	Kelompok Tani Utama	2 Kelompok

Sumber : Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan kabupaten Maros

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan Penyuluhan Kehutanan

1. Programa Penyuluhan

Programa penyuluhan disusun di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, program Penyuluhan Kehutanan untuk tahun 2007 Kabupaten Maros tertuang dalam Programa penyuluhan pertanian yang sifatnya jangka pendek untuk satu tahun. Program Penyuluhan untuk 5 subsektor yaitu Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan tergabung dalam satu programa penyuluhan.

Penyusunan programa dibuat sebagai pedoman kerja tahunan dalam penyelenggaraan penyuluhan Kehutanan yang merupakan salah satu wujud perencanaan dengan memadukan aspirasi masyarakat dengan potensi wilayah. Penyusunan program selain dilakukan secara aspiratif dengan mencari dan mendengarkan informasi yang sebanyak-banyaknya dari petani melalui pertemuan dan kunjungan ke lapangan juga dilakukan secara partisipatif yakni penyuluh turut melibatkan petani ikut berpartisipasi dengan meminta masukan dan informasi mengenai segala hal yang berhubungan dengan rencana kedepannya.

Adapun isi dari programa penyuluhan kehutanan mencakup :

1. Keadaan

a. Keadaan Sumber Daya Alam, meliputi :

- Letak geografis dan luas wilayah



- Luas lahan
- Keadaan Tanah dan iklim

b. Keadaan Sumber Daya Manusia meliputi:

- Jumlah penduduk
- Pekerjaan
- Pendidikan

2. Masalah

Masalah merupakan upaya untuk merumuskan hal-hal yang tidak dikehendaki atau faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki.

a. Masalah Tekhnis

Masalah yang sering didapatkan pada penerapan tekhnis di bidang kehutananan:

- Pemeliharaan Tanaman
- Agroforestry
- Penebangan liar

b. Masalah sosial

- Kerjasama antara kelompok masih kurang
- Hasil kesepakatan belum dipenuhi oleh petani
- Pemanfaatan fasilitas masih kurang

c. Masalah lingkungan

Masalah lingkungan yang sering terjadi :

- Sering terjadi kebakaran hutan pada musim kemarau
- Masih banyaknya hutan yang gundul

3. Penetapan tujuan dan kelompok sasaran

a. tujuan

- Meningkatkan pengetahuan petani
- Meningkatkan produksi
- Pengembangan usaha pertanian

b. Sasaran

- Memperbaiki kelembagaan kelompok tani
- Membentuk kelompok tani percontohan di setiap desa
- Memfasilitasi kelompok tani untuk menjalin kemitraan.

2. Rencana Kerja

Kegiatan penyuluhan Kehutanan di tingkat desa merupakan pembelajaran yang menggerakkan petani agar mereka mau dan menerapkan berbagai teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing. Dalam mengorganisasikan kegiatan pembelajaran tentunya diperlukan suatu Rencana Kerja yang harus disusun oleh Penyuluh Kehutanan sesuai tujuan yang ingin dicapai dan masalah yang dihadapi.

Rencana Kerja Penyuluh Kehutanan merupakan kurikulum atau pedoman dalam proses Penyuluhan Kehutanan ditingkat desa yang disusun setiap tahun. Adapun Kegiatan Penyuluhan Kehutanan yang direncanakan dalam rencana kerja adalah upaya untuk:

- a. Mempertahankan dan meningkatkan produksi dan produktifitas usaha di bidang kehutanan menuju ketersediannya kebutuhan akan papan.
- b. Mempertahankan dan meningkatkan pengendalian erosi dan banjir serta kesuburan tanah baik didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
- c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani baik dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
- d. Menghasilkan keputusan/keepakatan berbagai hasil musyawarah kelompok tani.

Adapun tujuan tersusunnya rencana kerja penyuluh kehutanan adalah sebagai pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan bagi petani.

Tabel 7. Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Wilayah Kerja BPP Tompobulu tahun 2007

Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Metoda	Sasaran	Sumber Biaya	Lokasi
Melakukan Pemeliharaan tanaman Kehutanan	Agar petani melakukan pemeliharaan tanaman Kehutanan	kunjungan Pertemuan	petani	swadana	Benteng gajah, Pucak, Tompobulu
Melakukan Pembuatan tanaman Agroforestri	Agar petani membuat tanaman agroforestry	kunjungan Pertemuan	petani	swadana	Pucak, Tompobulu
Melakukan pembuatan konservasi tanah, pada lahan kritis	Agar petani membuat konservasi tanah pada lahan kritis	kunjungan Pertemuan demonstrasi	petani	swadana	Tompobulu
Melaksanakan pembuatan hutan/kebun rakyat	Agar petani membuat hutan/kebun rakyat	kunjungan Pertemuan demonstrasi	petani	swadana	Semua desa

Sumber : Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, 2007

3. Kelembagaan Penyuluhan Kehutanan

Di Kabupaten Maros, Struktur organisasi Dinas lingkup Pertanian dan Kehutanan, selain dinas lingkup pertanian sampai pada tingkat kecamatan dengan adanya kantor dinas sebagai perwakilan dinas Kabupaten, terdapat pula Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang bertugas mengkoordinir kegiatan penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan di Kecamatan. Kelembagaan petani di wilayah Kerja BPP Tompobulu.

Tabel 8. Kelembagaan petani di Wilayah Kerja BPP Tompobulu Kabupaten Maros, tahun 2007.

No	Kelembagaan	jumlah	Persentase (%)
1	Kelompok Tani	59	89,4
2	Wanita Tani	2	3,0
3	Taruna Tani	1	1,5
4	Posluhtan	4	6.1
	Jumlah	66	100

Sumber: Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, 2007

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa kelembagaan yang memiliki jumlah kelompok terbesar yaitu kelembagaan Kelompok Tani sebanyak 59 atau 89,4 %, hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat di Wilayah Kerja BPP Tompobulu bermata pencaharian sebagai petani, sedangkan yang paling terkecil adalah kelompok Taruna Tani 1 kelompok atau 1,5%, untuk Kelembagaan Wanita Tani berjumlah 2 atau 3,0 % dan Posluhan sendiri berjumlah 4 atau 6,1 %.

B. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan

1. Sasaran dan Materi Penyuluhan

Sasaran dalam penyuluhan kehutanan adalah bagaimana materi penyuluhan dapat dipahami petani dalam beberapa kali pertemuan. Frekuensi pertemuan antara penyuluh dengan kelompok tani/petani yang Ideal dilakukan adalah tiap minggu. Isi materi penyuluhan terutama mengacu pada kebutuhan sasaran. Menurut Kartasapoetra (1991), materi penyuluhan harus memperhatikan kesesuaian dengan tingkat kemampuan sasaran, mengena pada sasaran dan tidak berentangan dengan adat istiadat juga kepercayaan mereka, dan memberikan atau mendatangkan berbagai keuntungan pada khalayak sasaran. Materi yang disusun harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti dan sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki.

Pada awal tahun 2007 telah dilakukan kegiatan benah kelompok. Kegiatan ini ditujukan untuk mendata kelompok tani yang betul-betul masih aktif dan yang tidak aktif. Hasilnya dari hampir 700 kelompok tani yang terdata pada tahun 2006, maka di tahun 2007 terdapat 661 kelompok tani aktif. Dari 661 kelompok tani tersebut, 48 kelompok tani berada dalam bimbingan penyuluh kehutanan. Kemudian dari 48 kelompok tani tersebut, 15 kelompok tani telah memiliki usaha kelompok berbasis kehutanan. Diantaranya ada yang bergerak di bidang usaha pembibitan tanaman buah dan kayu-kayuan, kelompok tani penghasil kemiri, pengembangan lebah madu, hutan rakyat dan kelompok tani penghasil tepung jahe. Adapun jenis materi yang diberikannya yaitu pemeliharaan hutan rakyat, fungsi hutan, Akibat penebangan hutan secara liar di dalam kawasan hutan, fungsi hutan lindung, dan akibat perladangan berpindah.

2. Metode Penyuluhan

Metode merupakan cara penyampaian pesan, dari penyuluh kepada petani. Bentuk metode penyuluhan yang sampai saat ini masih diterapkan adalah metode LAKU (latihan dan kunjungan). Metode ini masih dipakai dengan alasan: mudah diterapkan untuk menyampaikan pesan, dapat dilakukan kapan dan dimana saja, murah dan efektif, serta adanya keterbukaan antara penyuluh dengan petani. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan adalah Kegiatan Kunjungan dan Pertemuan Kelompok tani. Frekuensi kunjungan penyuluh ke kelompok tani/petani Ideal dilakukan 4 kali dalam sebulan jadi frekuensi ideal kunjungan dalam setahun sebanyak 48 kali.

Dengan metode LAKU, seorang penyuluh dapat saling bertemu untuk mendapatkan informasi dengan mengadakan pertemuan minimal 1 kali dalam seminggu. Selanjutnya pada hari kerja berikutnya penyuluh akan melakukan kunjungan rutin baik kepada individu petani maupun kelompok tani yang dibinanya. Kegiatan tersebut selain sebagai media untuk saling tukar informasi antar penyuluh, juga dapat dijadikan media peningkatan kapasitas dan kemampuan penyuluh dalam menghadapi tantangan di lapangan.

Tabel 9. Frekuensi kunjungan dan pertemuan kelompok tani di Wilayah Kerja BPP Tompobulu, Kabupaten Maros.

No	Jenis Kegiatan	Frekuensi (kali)	Persentase (%)
1	Pertemuan Kelompok Tani	49	57,6
2	Kunjungan Kelompok Tani	36	42,4
	Jumlah	85	100

Sumber: Data Primer, 2007

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pertemuan kelompok tani yang dilakukan oleh penyuluh sejumlah 49 kali atau 57,6 %, Lebih banyak dibandingkan dengan kunjungan Kelompok tani yaitu 36 kali atau 42,4%, artinya penyuluh melakukan kunjungan 3 kali setiap bulannya atau dapat dikatakan bahwa penyuluh kehutanan sangat jarang mengadakan kunjungan, dengan demikian sasaran terhadap program penyuluhan di BPP Tompobulu tidak akan tercapai secara meksimal karena frekuensi pertemuan dan kunjungan ke kelompok tani sangat menentukan keberhasilan penyampaian informasi ke sasaran.

3. Kegiatan Penyuluhan Kehutanan

Kegiatan Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan adalah kegiatan penyuluhan yang diarahkan dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang di hadapi oleh masyarakat. Kegiatan penyelenggaraan penyuluhan Pertanian dan Kehutanan ini dilaksanakan secara bersama-sama dan bersifat partisipatif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Secara umum masyarakat yang ada di wilayah Kerja Penyuluhan Tompobulu adalah masyarakat pertanian, hal ini didukung oleh keadaan sumber daya alam sehingga menjadikan pertanian sebagai kegiatan pokok. Untuk sektor Kehutanan sendiri kegiatan yang dilakukan yaitu 1) Pemeliharaan tanaman Kehutanan, 2) Pembuatan tanaman Agroforestry, 3) Pembuatan Konservasi tanah, 4) Pembuatan Kebun/Hutan rakyat. Pada Tabel 10 dapat dilihat luas areal yang digunakan untuk kegiatan Kehutanan.

Tabel 10. Luas areal lahan kegiatan Kehutanan di Wilayah Kerja BPP Tompobulu, Kabupaten Maros.

No	Kegiatan	Luas Areal (Ha)
1	Pemeliharaan Tanaman	767,67
2	Pembuatan Tanaman Agroforestry	1.051
3	Konservasi Tanah	200,43
4	Pembuatan Kebun/hutan rakyat	430
	Jumlah	2449,1

Sumber: Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, 2007

Dari Tabel 10 dapat dilihat bahwa pada Wilayah Penyuluhan Tompobulu, yang memiliki areal lahan terluas adalah kegiatan pembuatan Tanaman agroforestry yaitu 1.051,00 ha. Untuk kegiatan Pemeliharaan tanaman memiliki luas areal 767,67 ha, konservasi tanah 200,43 ha, dan pembuatan kebun/hutan rakyat 430 ha.

C. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan penilaian program dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk diskusi di antara penyuluh, selain itu juga dibahas tingkat keaktifan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya dan kendala-kendala yang dihadapi oleh penyuluh dilapangan. Supervisi dilaksanakan paling tidak dua kali seminggu. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada kendala atau hambatan yang ditemui di lapangan atau tidak. Adapun kendala-kendala yang dihadapi penyuluh antara lain :

1. Dana

Dana merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan Kehutanan. Semua kegiatan penyuluhan seharusnya ditunjang dengan dana yang relatif cukup memadai, sedang besar kecilnya dana tergantung pada bentuk penyuluhannya.

Sebelum berlakunya otonomi daerah, dana penyelenggaraan penyuluhan disediakan oleh pemerintah 100 %. Tapi masalahnya adalah akibat dari berlakunya otonomi daerah yang telah melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk pemerintah Kabupaten Maros, dana

penyuluhan yang disediakan sangat sedikit sehingga tidak mencukupi untuk suatu kegiatan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, untuk itu sebaiknya dana yang diperuntukkan untuk kegiatan penyuluhan langsung diberikan kewenangan kepada penyuluh sehingga penyelenggaraan penyuluhan dapat berjalan lebih optimal.

2. Jumlah Penyuluh

Penyuluh kehutanan di Kabupaten Maros sampai tahun 2007 ini berjumlah 15 orang sesuai SK yang ada, ke 15 orang tersebut sebagian besar telah memasuki usia 50 tahun yang berarti telah mendekati usia pensiun. Diharapkan penyuluh yang baru terangkat dapat menggantikan penyuluh yang akan segera masuk usia pensiun.

Tabel 11. Data penyuluh Kehutanan pada Badan Penyuluhan Pertanian kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, tahun 2007

No	Jabatan	Jumlah Jiwa	Wilayah kerja Penyuluhan
1	Penyuluh Kehutanan Pelaksana	1	Tompobulu
2	Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan	4	Tompobulu, Moncongloe, tanralili
3	Penyuluh Kehutanan Penyelia	4	Tompobulu, Marusu
4	Penyuluh Kehutanan Pertama	2	Mallawa, Cenrana
5	Penyuluh Kehutanan Muda	2	Simbang
6	Penyuluh Kehutanan Madya	2	Tanralili, Camba
Jumlah		15	

Sumber : Data Primer, 2007

Berdasarkan data diatas dan data wilayah kerja yang dilihat pada lampiran 1 maka jumlah Penyuluh Kehutanan yang berada pada wilayah kerja Kerja BPP Tompobulu berjumlah 4 orang kondisi tersebut cukup mempersulit pelayanan penyuluhan mengingat jumlah desa yang ada di wilayah BPP Tompobulu sebanyak delapan desa, jika dikaitkan dengan jumlah penyuluh yang ada maka,

perbandingannya kurang proposional sehingga mengakibatkan kegiatan penyuluhan tidak dapat berjalan dengan baik. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa Penyuluh Kehutanan yang berada pada wilayah kerja BPP Tompobulu termasuk dalam Penyuluh Kehutanan tingkat Terampil, yang terdiri dari Penyuluh Kehutanan Pelaksana, Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan, dan Penyuluh Kehutanan Penyelia, sedangkan untuk penyuluh kehutanan pertama, penyuluh kehutanan Muda dan penyuluh Kehutanan Madya sendiri termasuk dalam jenjang jabatan penyuluh kehutanan tingkat ahli.

Menurut Undang-undang no 35 tahun 2003 pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) tentang Petunjuk Pelaksanaan jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya menyatakan bahwa, Penyuluh kehutanan tingkat terampil adalah jabatan Fungsional penyuluh kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu, sedangkan penyuluh kehutanan tingkat ahli adalah jabatan penyuluh kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu. Untuk jenjang jabatan dan golongan penyuluh Kehutanan di Kabupaten Maros, dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Klasifikasi Penyuluh kehutanan menurut jabatan Pada Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros.

No	Jabatan	Gol	Jumlah jiwa	Persentase (%)
1	Penyuluh Kehutanan Pelaksana	II/d	2	13,3
2	Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan	III/a, III/b	4	26,7
3	Penyuluh Kehutanan Penyelia	III/c, III/d	3	20
4	Penyuluh Kehutanan Pertama	III/a	2	13,3
5	Penyuluh Kehutanan Muda	III/c	2	13,3
6	Penyuluh Kehutanan Madya	IV/a	2	13,3
Jumlah			15	100

Sumber : Data Primer, 2007

Pada Tabel 12 dilihat bahwa Pada Umumnya Penyuluh Kehutanan di Wilayah Kerja BPP Tompobulu terdiri dari golongan II/d, III/a, III/b, III/c dan golongan III/d. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan dengan golongan III/a, III/b memiliki jumlah terbanyak dengan persentase 26,7%. Kenaikan jabatan untuk Penyuluh Kehutanan dapat diperoleh berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki. Untuk Jabatan Penyuluh Kehutanan Terampil dalam hal ini penyuluh Kehutanan Pelaksana dapat dilihat pada lampiran 4 dimana (jumlah angka kredit 40 untuk golongan II/b, 60 angka kredit untuk golongan II/c, 80 angka kredit untuk golongan II/d). Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan (jumlah angka kredit 100 untuk golongan III/a, 150 angka kredit untuk golongan III/b), dan Penyuluh Kehutanan Penyelia (jumlah angka kredit 200 untuk golongan III/c, 300 angka kredit untuk golongan III/d). Untuk jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli dapat dilihat pada lampiran 5 yang terdiri dari



Penyuluh Kehutanan Pertama (jumlah angka kredit 100 untuk golongan III/a, 150 angka kredit untuk golongan III/b, Penyuluh Kehutanan Muda (jumlah angka kredit 200 untuk golongan III/c, 300 angka kredit untuk golongan III/d) dan untuk Penyuluh Kehutanan Madya (jumlah angka kredit 400 untuk golongan IV/a, 550 angka kredit untuk golongan IV/b, 700 angka kredit untuk golongan IV/c).

3. Tingkat Pendidikan Penyuluh

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal terakhir yang diikuti oleh penyuluh. Dalam menyampaikan informasi kepada petani latar belakang pendidikan sangat berperan dalam proses penyuluhan. Penyuluhan kehutanan yang memiliki pendidikan yang tinggi dan sesuai dengan bidangnya akan lebih mudah dalam memberikan penyuluhan. Tingkat pendidikan penyuluh kehutanan yang menjadi responden disajikan pada Tabel 13 berikut :

Tabel 13. Tingkat Pendidikan terakhir Penyuluh Kehutanan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMU	1	6,7
2	Diploma	8	53,3
3	Sarjana	6	40
	Jumlah	15	100

Sumber: Data primer, 2007

Dari Tabel 13 di atas, terlihat pada umumnya penyuluh kehutanan di Kabupaten Maros berpendidikan diploma (D3), yaitu sebanyak 8 orang atau 53,3%. Dari tabel tersebut terlihat juga bahwa penyuluh yang berpendidikan Sarjana sebanyak 6 orang atau 40% dan SMU 1 orang atau 6,7%, sehingga dapat dikatakan bahwa ditinjau dari tingkat pendidikan, penyuluh Kehutanan di Kabupaten Maros

cukup memadai. Perlu diakui bahwa upaya untuk mendorong para penyuluh kehutanan sering menemui kendala terutama dalam hal biaya. Hal ini dapat dimengerti karena baik pembiayaan yang bersumber dari pribadi maupun pemerintah daerah tidak mudah diperoleh.

Selain itu pula pendidikan dan latihan bagi penyuluh kehutanan sudah dirasakan sangat kurang. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja penyuluh terutama dalam hal kemampuan dan pengembangan dalam menghadapi tantangan yang semakin beragam. Oleh karena itu perlu ditambah lagi diklat bagi penyuluh baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah.

4. Sarana dan Prasarana Penyuluhan

Untuk mendukung kegiatan penyuluhan, maka diperlukan sarana dan prasarana yang diperlukan. Secara umum sarana kerja untuk kegiatan penyuluhan cukup sesuai karena adanya satu kelembagaan antara penyuluhan pertanian dan kehutanan. Adapun sarana dan Prasarana penyuluhan untuk tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Kondisi sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan pada Badan penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros tahun 2007

No	Nama sarana/prasarana	Jumlah
1	Media percontohan a. lahan percontohan b. Kebun Bibit	2 unit 5 unit
2	Peralatan audio visual a. Wareless b. Televisi c. Handycam	8 buah 1 buah 1 buah
3	Kendaraan bermotor	12 unit

Sumber : Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, 2007

Sarana dan Prasarana tersebut diatas berdasarkan sarana yang sudah/dapat dipakai untuk menunjang penyuluhan kehutanan. Pada umumnya sarana tersebut mulai pengadaan tahun 1998, dan sarana sebelum tahun tersebut sebagian besar sudah rusak berat dan banyak pula yang hilang. Untuk saat sekarang ini, sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan masih cukup memadai, maka untuk lebih mengoptimalkan kegiatan Penyuluhan sebaiknya perlu adanya penambahan sarana /prasarana penyuluhan, karena melihat bahwa jumlah kecamatan dikabupaten Maros memiliki perbandingan yang tidak proposional dengan jumlah sarana/prasarana yang ada. Sarana/Prasarana yang akan digunakan untuk tempat pertemuan kelompok tani pada Wilayah Kerja Penyuluhan Tompobulu, dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Tempat pertemuan Kelompok tani di Wilayah Kerja Penyuluhan Tompobulu, Kabupaten Maros

No	Tempat Pertemuan	Frekuensi (kali)	Persentase (%)
1	BPP	2	2,5
2	Kantor Desa	77	97,5
Jumlah		79	100

Sumber : Data primer, 2007

Dari Tabel 15 dapat dilihat bahwa tempat yang paling baik untuk mengadakan pertemuan ke kelompok tani adalah di kantor desa, dimana persentase pertemuan adalah 97,5 % atau 79 kali. Hal ini dikarenakan letaknya berdekatan dengan lahan usaha tani, jika dibandingkan dengan BPP yang letaknya di Kecamatan yang jauh dari lahan usaha tani. Sehingga memungkinkan lebih banyak penduduk yang akan datang pada kegiatan penyuluhan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan :

1. Kinerja Penyuluh Kehutanan pada Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Maros belum berjalan dengan baik.
2. Kendala-kendala yang ada pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan pada Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros antara lain: Jumlah penyuluh yang masih kurang, Tingkat pendidikan, Pembiayaan kegiatan penyuluhan kehutanan serta sarana dan prasarana penyuluhan.

B. Saran

1. Agar semangat kerja Penyuluh kehutanan kembali meningkat, sebaiknya pemerintah Kabupaten Maros menata kembali system penyelenggaraan penyuluhan baik yang menyangkut sarana prasarana/fasilitas kerja maupun pembinaan dan pengembangan ketenagaan.
2. Sebaiknya dibuat administrasi yang lengkap, sehingga dapat dijadikan sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan penyuluhan Kehutanan.

3. Pendanaan diperuntukkan bagi penyelenggaraan penyuluhan perlu diperbaiki dengan melibatkan lebih banyak lagi dana dari instansi-instansi pemerintah dan swasta, sehingga kinerja penyuluh dan pelaksanaan penyuluhan dapat berjalan dengan baik.
4. Perlu adanya penambahan penyuluh kehutanan pada setiap kecamatan sehingga pelaksanaan penyuluhan dapat berjalan lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Adjid, D. 1994. *Posisi Penyuluhan Pertanian dalam Dinamika Respon Usaha Tani Terhadap Tantangan Kemajuan*. Jakarta
- Arikunto, S. 2001. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 1996. *Penyuluhan Pembangunan Kehutanan*. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- 2000. *Buku Pintar Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan*. Edisi kedua. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- 2004. *Pedoman Umum Penyuluhan Kehutanan*. Pusat Penyuluhan Kehutanan. Jakarta
- Dharma, A. 1991. *Manajemen Prestasi Kerja*. Rajawali Press. Jakarta.
- Firman, B. 1990. *Perencanaan dan Evaluasi Suatu Sistem Untuk Proyek Pembangunan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Makmur, S. 2006. *Sistem perencanaan Pembangunan nasional*. Jabar online. ([www.Dephut Jabar](http://www.DephutJabar)) (Diakses tanggal 10 Oktober 2007).
- Mardikanto, T. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Mulyana, Y. 1999. *Materi Penyuluhan Kehutanan II*. Pusat Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta.
- Puspadi, K. 1999. *Laporan Temu Profesi Penyuluh Pertanian*. Pusat pembinaan Penyuluh Pertanian. Jakarta
- Syamsuddin, U. 1987. *Dasar-Dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian*. Bina Cipta. Bandung.

- Wardojo, W. 2007. **Acuan Operasional Penyuluhan Kehutanan**. Departemen Kehutanan Republik Indonesia (*www. Departemen Kehutanan RI*) (Diakses Tanggal 6 Oktober 2007).
- Wiroatmadja, S. 1997. **Pokok-Pokok Penyuluhan Pertanian**. PT. Yasaguna. Jakarta.

L
a
M
P
T
R
a
N

Lampiran 1 : Identitas Responden

No	Nama Responden	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Tingkat pendidikan	Jabatan	Pangkat/gol	Wilayah Kerja Penyuluhan
1	Sainal, S.Hut	Laki-laki	51	S1	PK Madya	Pembina/IV-a	Tanraji
2	H. Amiri S, SP	Laki-laki	54	S1	PK Madya	Pembina/IV-a	Camba
3	Sunusi	Laki-laki	51	D III	PK Penyelia	Penata TK I/III-d	Tompobulu
4	Adib Munawar, SP, M.Si	Laki-laki	34	S2	PK Muda	Penata/III-c	Kabupaten
5	Abd Muttalib, S.Hut	Laki-laki	46	S1	PK Muda	Penata/III-c	Simbang
6	Dharma Kamase	Laki-laki	54	D III	Pk Penyelia	Penata/III-c	Tompobulu
7	Zainuddin	Laki-laki	54	DIII	PK Penyelia	Penata/III-c	Marusu
8	Zainal Arifin	Laki-laki	53	D III	PK Pelaksana Lanjutan	Penata Muda TK I/III-b	Moncongloe
9	Ramli	Laki-laki	48	DIII	PK Pelaksanaan Lanjutan	Penata Muda/III-a	Moncongloe
10	M. Bahrin	Laki-laki	50	D III	PK Pelaksanaan Lanjutan	Penata Muda/III-a	Tanraji
11	Muh Nur, S.P	Laki-laki	48	S1	PK Pertama	Penata Muda/III-a	Mallawa
12	Ismail K	Laki-laki	49	D III	PK Pelaksanaan Lanjutan	Penata Muda/III-a	Tompobulu
13	Darwis Massing, S.Hut	Laki-laki	33	S1	PK Pertama	Penata Muda/III-a	Cenrana
14	Muh. Ramli	Laki-laki	56	SMU	Pk Pelaksana	Pengatur Tk I/II-d	Tompobulu
15	Hasan Idrus	Laki-laki	51	D III	PK Pelaksana	Pengatur Tk I/II-d	Kabupaten

Lampiran 2 : RENCANA KERJA PENYULUHAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN BPP/KECAMATAN TOMPOBULU TAHUN 2007

No	Masalah	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Metoda	Sasaran	Volume/ frekwensi	Sumber Biaya	Waktu Pelaksanaan	Lokasi
1	Baru 30 % petani melakukan pemeliharaan tanaman kehutanan	Melakukan Pemeliharaan tanaman Kehutanan	Agar 50% petani melakukan pemeliharaan tanaman Kehutanan	- kunjungan - Pertemuan	petani	- 5 kali - 10 kali	swadana	Jan - Des 07	Benteng gajah, Pucak, Tompobulu
2	Baru 35 % petani membuat tanaman Agroforestry	Melakukan Pembuatan tanaman Agroforestri	Agar 50 % petani membuat tanaman agroforestry	- kunjungan - Pertemuan	petani	- 12 kali - 15 kali	swadana	Jan - Des 07	Pucak, Tompobulu
3	Baru 25% petani melakukan konservasi tanah, pada lahan kritis	Melakukan pembuatan konservasi tanah, pada lahan kritis	Agar 50% petani membuat konservasi tanah pada lahan kritis	- kunjungan - Pertemuan - demonstrasi	petani	- 16 kali - 8 kali	swadana	Jan - Des 07	Tompobulu
4	Baru 35% petani yang membuat hutan/kebun rakyat	Melaksanakan pembuatan hutan/kebun rakyat	Agar 50% petani membuat hutan/kebun rakyat	- kunjungan - Pertemuan - demonstrasi	petani	- 17 kali - 25 kali	swadana	Jan - Des 07	Semua desa



Lampiran 3 : REKAPITULASI LAPORAN TRIWULAN KEGIATAN PENYULUHAN KEHUTANAN BPP TOMPOBULU KABUPATEN MAROS
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Maret 2007

No	Jenis Kegiatan	Materi/topic Penyuluhan	Vol (kali)	Waktu Pelaksanaan	Lokasi kegiatan	Jumlah peserta	Masalah	Pemecahan Masalah
1	Pertemuan Kelompok	Pemeliharaan hutan mangrove/bakau	4x	Januari 2007	Di kelompok tani	47 orang	Petani butuh bibit mangrove	Hubungi Dinas kehutanan Maros
2	Kunjungan Kelompok tani	Pemeliharaan Hutan Rakyat (hutan jati)	7x	Pebruari 07	7 desa/kel. tani	82 orang	Hutan rakyat kurang dipelihara	Dipelihara secara berkesinambungan dengan baik
Waktu Pelaksanaan : April s/d Juni 2007								
No	Jenis Kegiatan	Materi/topic Penyuluhan	Vol (kali)	Waktu Pelaksanaan	Lokasi kegiatan	Jumlah peserta	Masalah	Pemecahan Masalah
1	Pertemuan Kelompok	Konservasi Tanah secara teknik sipil	8x	April 07	8 desa/Kel tani	94 orang	Dana yang dibutuhkan agak sedikit	Kerja secara berkelompok dan bergilir
2	Kunjungan Kelompok Tani	Pemeliharaan hutan rakyat	8x	April 07	8 desa/Kel tani	89 orang	Banyak temak sapi yang berkeliaran	Kebun diberi pagar hidup
3	Kunjungan Kelompok Tani	Akibat pencabangan hutan secara liar didalam kawasan hutan	8x	Mei 07	8 desa/Kel tani	89 orang	Memenuhi kebutuhan bahan bangunan rumah/papan	Menanam kayu-kayuan untuk memenuhi kebutuhan papan
4	Kunjungan kelompok Tani	Cara Pencegahan kebakaran dalam kawasan hutan	8x	Juni 07	8 desa/Kel tani	98 orang	Terjadi kebakaran secara alami	Membuat sekat-sekat/lorong pemisah
5	Pertemuan kelompok tani	Fungsi hutan secara umum	7x	Juni 07	7 desa/kel. tani	85 orang	Masyarakat kurang memahami tentang fungsi hutan	Memberikan pemahaman tentang fungsi hutan

Waktu Pelaksanaan : juli s/d September 2007

No	Jenis Kegiatan	Materi/topic Penyuluhan	Vol (kali)	Waktu Pelaksanaan	Lokasi kegiatan	Jumlah peserta
1	Pertemuan Kel. Tani	Fungsi Hutan Lindung	8x	Juli 07	8 desa/Kel tani	98 orang
2	Pertemuan kelompok tani	Cara mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan	6x	Juli 07	6 desa/Kel tani	69 orang
3	Kunjungan kel. tani	Akibat yang ditimbulkan perladangan berpindah - pindah	3x	Juli 07	3 desa/kel tani	38 orang
4	Pertemuan kel. tani	Penanaman rumput gajah untuk pakan ternak	2x	Agustus 07	2 desa/kel. tani	27 orang

Waktu Pelaksanaan : Oktober s/d Desember 2007

No	Jenis Kegiatan	Materi/ topic Penyuluhan	Vol (kali)	Waktu Pelaksanaan	Lokasi kegiatan	Jumlah peserta
1	Pertemuan kel. tani	Sosialisasi/FEATI	4x	Oktober 07	4 desa	160 orang
2	Pertemuan kel tani	Pembentukan dan pemilihan pengurus poluitan/pengelola FMA Desa	4x	Oktober 07	4 desa	165 orang
3	Pertemuan kel. tani	Pemilihan peiaasi pemandu (penyuluh pertanian/kehutanan swadaya Ikt Desa)	4x	Oktober 07	4 desa	127 orang
4	Pertemuan kel. tani	Forum koordinasi penyuluhan kehutanan pertanian/kehutanan	1x	Nopember 07	BPP Tompobulu	35 orang
5	Pertemuan kelompok tani	Penyelenggaraan sistim latihan dan kunjungan	1x	Nopember 07	BPP. Tompobulu	50 orang

Lampiran 4: Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat penyuluh kehutanan tingkat terampil

No	Unsur	Persentase	Jenjang jabatan/golongan ruang/angka kredit				Penyuluh kehutanan penyelia		
			Penyuluh kehutanan Pelaksana		Penyuluh Kehutanan pelaksanaan lanjutan		III/c	III/d	
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b		
1.	Unsur Utama A. Pendidikan B. Persiapan penyuluhan kehutanan. C. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan D. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan E. Pengembangan profesi	> 80 %	32	48	64	80	120	160	240
2.	Unsur penunjang Kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan Jumlah	< 20 %	8	12	16	20	30	40	60
		100 %	40	60	80	100	150	200	300

Lampiran 6 : Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat penyuluh kehutanan tingkat ahli

No	Unsur	Persentase	Jenjang jabatan/golongan ruang/angka kredit						
			Penyuluh kehutanan Pertama		Penyuluh kehutanan Madya				
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1.	Unsur Utama A. Pendidikan B. Persiapan penyuluhan kehutanan. C. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan D. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan E. Pengembangan dan penyuluhan kehutanan F. Pengembangan profesi	> 80 %	80	120	160	240	320	440	560
2.	Unsur penunjang Kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan Jumlah	< 20 % 100 %	20 100	30 150	40 200	60 300	80 400	110 550	140 700

Lampiran 5 : Rincian Kegiatan Penyuluh Kehutanan tingkat terampil dan Angka kreditnya

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	Pelaksana
I	Pendidikan	3	4	5	6	7
I	A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar	A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar	1. Sarjana Muda/Diploma III	Setiap ijazah	60	Semua jenjang
			2. Diploma II	Setiap ijazah	40	Semua jenjang
			1. lamanya > 960 jam	Setiap sertifikat	15	Semua jenjang
			2. lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya 481 – 640 jam	Setiap sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya 161-480 jam	Setiap sertifikat	3	Semua jenjang
II	B. Pendidikan dan gelar Fungsional dibidang Penyuluh Kehutanan dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan (STTP) atau sertifikat	A. Identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan	5. Lamanya 81-160 jam	Setiap sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya 30-80 jam	Setiap sertifikat	1	Semua jenjang
			1. Mengumpulkan data dan informasi wilayah kerja : a. Primer b. Sekunder	Setiap laporan Setiap laporan	0.16 0.03	PK Pelaksana Lanjutan PK Pelaksana
			2. Mengolah data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat a. Desa dan Kecamatan b. Kabupaten/Kota c. Propinsi	Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan	0.03 0.07 0.16	PK Pelaksana PK Pelaksana Lanjutan PK Penyelia

No	Unsur	Sub	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
			3. Merencanakan rencana usaha wanatani wilayah dan agroecosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan	Setiap laporan	0.09	PK Pelaksana Lanjutan
			4. Menyusun monografi wilayah kerja penyuluhan	Setiap laporan	0.32	PK Pelaksana Lanjutan
			5. Menyusun/membuat peta tematik tentang kondisi dan potensi wilayah dan agroecosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan	Setiap Peta	0.31	PK Pelaksana Lanjutan
			6. Merumuskan kebutuhan teknologi Kehutanan	Setiap naskah	0.12	PK Pelaksana Lanjutan
			7. Memandu penyusunan rencana tahunan usaha wanatani kelompok sasaran	Setiap rencana	0.02	PK Pelaksana Lanjutan
			1. Identifikasi Kebutuhan penyuluhan Kehutanan :			
			a. Menyusun Rencana Identifikasi	Setiap rancangan	0.14	PK Penyelia
			b. Melaksanakan kajian identifikasi	Setiap Laporan	0.01	PK Pelaksana Lanjutan
			c. Merumuskan hasil identifikasi	Setiap laporan	0.05	PK Pelaksana Lanjutan
			2. Menyusun Konsep program Penyuluhan Kehutanan :			
			a. Menyusun Konsep program penyuluhan Kehutanan	Setiap konsep program	0.17	PK Penyelia
			b. Mendiskusikan konsep Program Penyuluhan Kehutanan ; 1). Sebagai penyaji	Setiap konsep	0.04	PK Pelaksana Lanjutan

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
			2). Sebagai pembahas c. Merumuskan program penyuluhan kehutanan hasil diskusi	Setiap konsep Setiap naskah program	0.10 0.10	PK Penyelia PK Penyelia
		C. Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Kehutanan	1. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh sesuai dengan jenjang jabatan a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan c. Penyuluh Kehutanan penyelia	Setiap rancana Kerja Setiap rancana Kerja	0.08 0.19	PK Pelaksana PK Pelaksana Lanjutan
		D. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kehutanan	2. Memandu penyusunan Rencana definitive Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif kebutuhan Kelompok (RDKK): a. Kelompok wanatani b. Kelompok sasaran lain	Setiap rencana kerja	0.39	PK Penyelia
			1. Penyusunan Panduan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Kehutanan	Setiap buku	0.40	PK Penyelia
			2. Penyusunan kerangka acuan pelaksanaan Kegiatan (sekolah lapang/magang)	Setiap kerja acuan	0.32	PK penyelia
III	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan	A. Penyusunan materi Penyuluhan Kehutanan	1. Mengumpulkan dan Menyiapkan materi Penyuluhan Kehutanan: a. Mengumpulkan data b. Mengolah data c. Menganalisis data 2. Menyusun/membuat materi penyuluhan Kehutanan dalam Bentuk : a. Media papan 1). Foto 2). Seri foto (min 5 lbr)	Setiap paket Setiap paket Setiap paket	0.04 0.07 0.08	PK Pelaksana PK Pelaksana Lanjutan PK Penyelia
			3). Flip chart (min 5 lbr) 4). Chart/gambar	Setiap lembar Setiap paket Setiap paket Setiap gambar	0.03 0.07 0.09 0.10	PK Pelaksana PK Pelaksana lanjutan PK Pelaksana PK Pelaksana

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
			<p>b. Media terproyeksi/audiovisual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Slide 2). Siaran sandiwar di radio/TV <p>c. Media cetak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Menyusun dan membuat selebaran/pamphlet, oleh: <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluh kesehatan pelaksana Lanjutan 2). Leaflet/folder, oleh: <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluh Kesehatan Pelaksana lanjutan - Penyuluh Kesehatan Penyelia 3). Poster, oleh: <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluh Kesehatan Pelaksana lanjutan - Penyuluh Kesehatan Penyelia 4). Brosur/booklet (min 1000 kata), oleh : <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluh Kesehatan Pelaksana Lanjutan - Penyuluh Kesehatan Penyelia <p>d. realita</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Maket 2) Diorama 3) Model 4) Specimen 5) Maock Up 	<p>Setiap naskah</p> <p>Setiap naskah</p> <p>Setiap naskah</p> <p>Setiap naskah</p> <p>Setiap naskah</p> <p>Setiap naskah</p> <p>Setiap naskah</p> <p>Setiap naskah</p> <p>Setiap naskah</p> <p>Setiap naskah</p> <p>Setiap Unit</p> <p>Setiap Unit</p> <p>Setiap Unit</p> <p>Setiap Unit</p> <p>Setiap Unit</p> <p>Setiap laporan</p> <p>Setiap laporan</p> <p>Setiap laporan</p>	<p>0.12</p> <p>1.81</p> <p>0.15</p> <p>0.30</p> <p>0.30</p> <p>0.60</p> <p>0.28</p> <p>0.56</p> <p>0.28</p> <p>0.56</p> <p>0.16</p> <p>0.80</p> <p>0.75</p> <p>0.04</p> <p>0.16</p> <p>0.01</p> <p>0.04</p> <p>0.07</p>	<p>PK Penyelia</p> <p>PK Penyelia</p> <p>PK Pelaksana Lanjutan</p> <p>PK Pelaksana Lanjutan</p> <p>PK Pelaksana Lanjutan</p> <p>PK Pelaksana Lanjutan</p> <p>PK Pelaksana Lanjutan</p> <p>PK Pelaksana Lanjutan</p> <p>PK Pelaksana Lanjutan</p> <p>PK Pelaksana Lanjutan</p> <p>PK Pelaksana Lanjutan</p> <p>PK Pelaksana Lanjutan</p> <p>PK Pelaksana Lanjutan</p> <p>PK Pelaksana Lanjutan</p> <p>PK Pelaksana Lanjutan</p> <p>PK Pelaksana Lanjutan</p> <p>PK Pelaksana Lanjutan</p> <p>PK Pelaksana Lanjutan</p> <p>PK Pelaksana Lanjutan</p>
		B. Penerapan Metode Penyuluhan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kunjungan tatap muka/anjingsana kepada anggota kelompok sasaran oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyuluh Kesehatan Pelaksana b. Penyuluh Kesehatan Pelaksana Lanjutan c. Penyuluh Kesehatan Penyelia 2. Melakukan kunjungan tatap 	<p>Setiap laporan</p> <p>Setiap laporan</p> <p>Setiap laporan</p>	<p>0.01</p> <p>0.04</p> <p>0.07</p>	<p>PK Pelaksana Lanjutan</p> <p>PK Pelaksana Lanjutan</p> <p>PK Pelaksana Lanjutan</p>

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
			muka/anjangsa kepada kelompok sasaran oleh :			
			a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana	Setiap laporan	0.03	PK Pelaksana
			b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana lanjutan	Setiap laporan	0.08	PK Pelaksana Lanjutan
			c. Penyuluh Kehutanan Penyelia Setiap laporan	Setiap laporan	0.16	PK Penyelia
			3. Melakukan kaji terap teknologi anjuran/uji coba	Setiap naskah instrumen	0.38	PK Pelaksana Lanjutan
			4. Melakukan demonstrasi (percontohan);	Setiap kali	0.03	PK Pelaksana
			a. Demonstrasi cara	Setiap unit	0.02	PK Pelaksana
			b. Demonstrasi hasil	Setiap unit	0.08	PK Pelaksana lanjutan
			1). Percontohan Petak (Demonstrasi plot)	Setiap Unit	0.27	PK Penyelia
			2). Percontohan usahatani kehutanan (demonstrasi farm)			
			3). Percontohan wilayah (demonstrasi area)			
			5. Melaksanakan temu lapang	Setiap kali	0.03	PK Pelaksana
			6. Melaksanakan temu teknis antar wilayah/fungsi			
			a. Sebagai moderator	Setiap kali	0.05	PK Pelaksana Lanjutan
			b. Sebagai narasumber	Setiap kali	0.04	PK Pelaksana Lanjutan
			7. Melakukan temu wicara/sarasahan dengan kelompok sasaran:			
			a. Tingkat BPP/Kecamatan	Setiap kali	0.02	PK Pelaksana
			b. Tingkat Kabupaten	Setiap kali	0.05	PK Pelaksana Lanjutan
			c. Tingkat propinsi	Setiap kali	0.22	PK Penyelia
			8. Melakukan temu karya kepada :	Setiap kali	0.04	PK Pelaksana
			a. Kelompok tani binaan	Setiap kali	0.09	PK Pelaksana Lanjutan
			b. Tokoh masyarakat/agama	Setiap kali	0.18	PK Penyelia
			9. Melakukan temu usaha	Setiap kali	0.07	PK Pelaksana Lanjutan

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
			10. Melaksanakan kegiatan widyarkarya/karyawisata kepada: a. Kelompok tani binaan b. Tokoh masyarakat/agama c. Tingkat propinsi	Setiap kali Setiap kali Setiap kali	0.03 0.08 0.16	PK Pelaksana PK Pelaksana Lanjutan PK Penyelia
			11. Melaksanakan kegiatan widyarkarya (perjalanan praktek studi banding sebagai instruktur/pembimbing): a. Tingkat desa dan Kecamatan b. Tingkat Kabupaten/kotamadya	Setiap laporan Setiap laporan	0.48 0.06	PK Penyelia PK Pelaksana
			c. Tingkat propinsi	Setiap laporan	0.08	PK Pelaksana Lanjutan
			12. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/kampanye dalam bentuk: a. Ceramah umum: 1). Tingkat Desa dan Kecamatan 2). Tingkat Kabupaten/Kotamadya 3). Tingkat propinsi	Setiap laporan Setiap Laporan Setiap laporan	0.02 0.06 0.12	PK Pelaksana PK Pelaksana Lanjutan PK Penyelia
			b. Melaksanakan kegiatan pameran kelurahan 1). Tingkat kabupaten Kotamadya - Sebagai pembuat karya/desain - Setiap pramu wicara	Setiap kali Setiap kali	0.18 0.06	PK Penyelia PK Pelaksana Lanjutan
			2). Tingkat propinsi - Sebagai pembuat karya/desain	Setiap kali	0.30	PK Penyelia
			13. Melakukan Penyuluhan melalui siaran radio/tv : - Sebagai pembaca maskah/pemain tunggal	Setiap kali	0.05	PK Penyelia
			14. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada: a. Perorangan oleh:			

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
			1). Penyuluh Kehutanan Pelaksana 2). Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan 3). Penyuluh Kehutanan Penyelia b. Kelompok sasaran lain oleh: 1). Penyuluh Kehutanan Pelaksana 15. Memberikan bimbingan teknis/kursus kepada kelompok sasaran: a. Menyusun kurikulum kursus b. Melaksanakan bimbingan pada sekolah lapang	Setiap orang Setiap orang Setiap orang Setiap kelompok Setiap gppp Setiap kali	0.01 0.03 0.06 0.01 0.48 0.16	PK Pelaksana PK Pelaksana Lanjutan PK Penyelia PK Pelaksana PK Penyelia
			1. Mendorong pembentukan organisasi kelompok sasacat: a. Menumbuhkan kelompok 2. Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari: a. Pemula-lanjut b. Lanjut - madya c. Madya-Utama 3. Berperan serta dalam perlombaan keterampilan bidang kehutanan sebagai berikut: - Melaksanakan penilaian lomba 1. Melakukan pemantauan/pengendalian 2. Pengolahan data hasil pemantauan/pengendalian 3. Rekomendasi tindak lanjut hasil pemantauan/pengendalian	Setiap kelompok Setiap kelompok Setiap Kelompok Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan Setiap Laporan	0.03 0.02 0.04 0.09 0.32 0.06 0.05 0.20	PK Pelaksana PK Pelaksana Lanjutan PK Penyelia PK Pelaksana Lanjutan PK Penyelia PK Pelaksana Lanjutan PK Penyelia
IV	Pemanfaatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan	C. Pengembangan swadaya dan swakarya kelompok sasaran A. Memantau pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan				

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		B. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan Kehutanan	1. Mengumpulkan data hasil pelaksanaan penyuluhan Kehutanan 2. Mengolah, menganalisis dan menyusun konsep laporan data hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan	Setiap Laporan Setiap laporan	0.05 0.54	PK Pelaksana Lanjutan PK Penyelia
		C. Membuat laporan pelaksanaan penyuluhan Kehutanan	1. Menyusun laporan pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan a. Bulanan 1). Penyuluh Kehutanan Pelaksana 2). Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjut	Setiap laporan Setiap Laporan	0.01 0.04	PK Pelaksana PK Pelaksana Lanjutan
			3). Penyuluh Kehutanan Penyelia b. Trivulian	Setiap laporan	0.08	PK Penyelia
			1). Penyuluh Kehutanan Pelaksana 2). Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjut	Setiap laporan Setiap laporan	0.02 0.06	PK Pelaksana PK Pelaksana Lanjutan
			3). Penyuluh Kehutanan Penyelia c. Tahunan	Setiap laporan	0.12	PK Penyelia
			1). Penyuluh Kehutanan Pelaksana 2). Penyuluh Kehutanan Pelaksana lanjut	Setiap laporan Setiap laporan	0.06 0.15	PK Pelaksana PK Pelaksana Lanjutan
			3). Penyuluh Kehutanan Penyelia	Setiap Laporan	0.30	PK Penyelia
V	Pengembangan profesi	A. Membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang penyuluhan Kehutanan	1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survey/evaluasi di bidang Penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diadarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Setiap buku Setiap naskah	12.50 6.00	Semua jenjang Semua jenjang

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
			<p>2. Karya tulis tinjauan atau ulasan ilmiah gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan:</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LPI</p> <p>3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>4. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, Gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah</p>	<p>Setiap buku</p> <p>Setiap naskah</p> <p>Setiap naskah</p> <p>Setiap karya</p> <p>Tiap rumusan</p> <p>Tiap rumusan</p> <p>Setiap buku petunjuk</p>	<p>8.00</p> <p>4.00</p> <p>7.00</p> <p>3.50</p> <p>2.50</p> <p>5.00</p> <p>2.50</p> <p>1.50</p> <p>2.00</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
		<p>B. Mengembangkan teknologi tepat guna dibidang penyuluhan Kehutanan</p> <p>C. Merumuskan system penyuluhan Kehutanan</p>	<p>Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan</p> <p>1. Merumuskan system penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan</p> <p>2. Merumuskan system penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan perbaikan</p>	<p>Setiap karya</p> <p>Tiap rumusan</p> <p>Tiap rumusan</p>	<p>5.00</p> <p>2.50</p> <p>1.50</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
		D. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan	Membuat buku pedoman/petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan	Setiap buku petunjuk	2.00	Semua jenjang

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
VI	Penujangan penyuluhan Kehutanan	<p>A. Mengajar/melatih di bidang penyuluhan kehutanan</p> <p>B. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan kehutanan</p> <p>C. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang penyuluhan kehutanan</p>	<p>Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan kehutanan</p> <p>1. Terjemahan/saduran dibidang kehutanan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk yang dicetak dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh lembaga ilmu pengetahuan Indonesia</p> <p>2. Terjemahan/saduran dibidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah</p> <p>3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan</p> <p>Mengikuti seminar/lokakarya atau symposium sebagai: a. Penarasaran b. Moderator c. Pembahas d. Narasumber e. Peserta</p>	<p>Setiap 2 jam pembelajaran</p> <p>Setiap buku</p> <p>Setiap makalah</p> <p>Setiap makalah</p> <p>Setiap naskah</p> <p>Setiap kegiatan</p> <p>Setiap kegiatan</p> <p>Setiap kegiatan</p> <p>Setiap kegiatan</p> <p>Setiap kegiatan</p>	<p>0.04</p> <p>7.00</p> <p>3.50</p> <p>3.00</p> <p>1.50</p> <p>1.50</p> <p>3.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>1.00</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		D. Menjadi anggota Tim penilai jabatan penyuluh kehutanan E. Memperoleh piagam kehormatan	Menjadi anggota timpenilai jabatan penyuluhan kehutanan	Setiap tahun	0.50	Semua jenjang
			1. Tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya: a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Setiap piagam	3.00	Semua jenjang
				Setiap piagam	2.00	Semua jenjang
				Setiap piagam	1.00	Semua jenjang
			2. Gelar Kehormatan akademis	Setiap gelar	15	Semua jenjang

Lampiran 7: RINCIAN KEGIATAN PENYULUH KEHUTANAN TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
I	Pendidikan	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1. Doktor 2. Pasca sarjana 3. Sarjana/Diploma IV	Setiap ijazah Setiap ijazah Setiap ijazah	150 100 75	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan dan mendapat surat tanda tamat pendidikan dan Pelatihan (STIPP) atau sertifikat	1. lamanya lebih dari 950 jam 2. Lamanya antara 641-960 jam 3. Lamanya antara 481-640 jam 4. Lamanya antara 161 – 480 jam 5. Lamanya antara 81-160 jam 6. Lamanya antara 30 – 80 jam	Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat	15 9 6 3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
II	Persiapan	A. Identifikasi potensi wilayah dan agrosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan	1. Menyusun instrument identifikasi Agrosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan	Setiap naskah instrumen Setiap laporan	0.16 0.07	PK Pertama PK Muda

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
			a. Menyusun konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani	Setiap konsep	0.36	PK Madya
			b. Mendiskusikan konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani:			
			1). Setiap penyaji	Setiap kali	0.12	PK Madya
			2). Sebagai narasumber	Setiap kali	0.12	PK Madya
			3). Sebagai Pembahas	Setiap kali	0.80	PK Muda
			c. Merumuskan rancang bangun rekayasa usaha wanatani	Setiap naskah	0.36	PK Madya
		B. Penyusunan program penyuluhan kehutanan	1. Menyusun konsep program penyuluhan kehutanan:			
			a. Mendiskusikan konsep programa penyuluhan kehutanan:			
			1). Sebagai narasumber	Setiap konsep	0.04	PK Pertama
		C. Penyusunan rencanakanerja penyuluhan kehutanan	1. Menyusun rancangan kerja tahunan penyuluh			
		D. Penyusun rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan	Sesuai dengan jenjang jabatan	Setiap rencana kerja	0.19	PK Pertama
			a. Penyuluh kehutanan Pertama			
			b. Penyuluh Kehutanan Muda	Setiap rencana Kerja	0.58	PK Muda
			c. Penyuluh kehutanan Madya	Setiap rencana Kerja	0.58	PK Madya
			1. Menyusun rancangan sarana penyuluhan	Setiap rencana Kerja	0.07	PK Pertama
		A. Penyusunan materi penyuluhan kehutanan	1. Mengumpulkan dan menyiapkan materi penyuluhan kehutanan	Setiap paket	0.32	PK pertama
			a. Menyusun instrumen			
			2. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan untuk/dalam bentuk:	Setiap papan dis	0.16	PK Pertama
			a. Media papan			
			1) Buletin board (papan Buletin)	Setiap naskah	0.06	PK Pertama
			b. Media terproyeksi/audiovisual			
			1). OHP transparan			
			2). Seri slide (min 10 lbr)	Setiap naskah	0.08	PK Pertama
			3). Sound slide (min 10 lbr)	Setiap naskah	0.40	PK Muda
III	Pelaksanaan Penyuluhan kehutanan					

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
			<p>4). Video (rekaman) min 5 menit</p> <p>5). Siaran radio tv</p> <p>c. Media cetak</p> <p>1). Selebaran/pamphlet, oleh;</p> <p>- Penyuluh kehutanan pertama</p> <p>- Penyuluh Kehutanan Muda</p> <p>- Penyuluh Kehutanan Madya</p> <p>2). Leaflet/folder oleh:</p> <p>- Penyuluh Kehutanan Pertama</p> <p>- Penyuluh Kehutanan Muda</p> <p>- Penyuluh Kehutanan Madya</p> <p>3). Poster oleh :</p> <p>- Penyuluh Kehutanan Pertama</p> <p>- Penyuluh Kehutanan Muda</p> <p>- Penyuluh Kehutanan Madya</p> <p>4). Brosur/booklet, oleh:</p> <p>- Penyuluh Kehutanan pertama</p> <p>- Penyuluh Kehutanan Muda</p> <p>- Penyuluh Kehutanan Madya</p>	<p>Setiap naskah</p> <p>Setiap naskah</p> <p>Setiap 1x terbit</p> <p>Setiap 1x terbit</p> <p>Setiap 1x terbit</p> <p>Setiap naskah</p> <p>Setiap naskah</p> <p>Setiap Naskah</p> <p>Setiap naskah</p> <p>Setiap naskah</p> <p>Setiap Naskah</p> <p>Setiap naskah</p> <p>Setiap Naskah</p> <p>Setiap Naskah</p> <p>Setiap design</p> <p>Setiap laporan</p> <p>Setiap kafi</p> <p>Setiap kali</p>	<p>0.60</p> <p>0.60</p> <p>0.15</p> <p>0.30</p> <p>0.45</p> <p>0.28</p> <p>0.56</p> <p>0.84</p> <p>0.28</p> <p>0.56</p> <p>0.84</p> <p>0.30</p> <p>0.60</p> <p>0.90</p> <p>0.64</p> <p>0.16</p> <p>0.06</p> <p>0.08</p>	<p>Pk Muda</p> <p>PK muda</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Pertama</p>
			<p>B. Penerapan metode Penyuluhan Kehutanan</p> <p>1. Melakukan kaji terap teknologi anjuran/uji coba:</p> <p>a. Membuat desain kaji terap/uji coba</p> <p>b. Memantau dan mengevaluasi hasil kaji terap teknologi</p> <p>2. Melaksanakan temu teknis antar wilayah/fungsi:</p> <p>a. Sebagai pembicara/penyaji</p> <p>3. Melakukan temu wicara/sarasahan dengan kelompok sasaran:</p> <p>a. Tingkat nasional</p>			

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
			<p>4. Melakukan temu karya kepada: - Pemd, LSM, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan lainnya - Perguruan tinggi, Cendekiawan, pemerintah pusat</p> <p>5. Melaksanakan kegiatan widyarkarya/karyawisata Kepada: - Pemd, LSM, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan lainnya - Perguruan tinggi, cendekiawan, pemerintah pusat</p> <p>6. Melaksanakan kegiatan widyarkarya (perjalanan praktek studi banding sebagai instruktur/pembimbing): a. Tingkat Nasional b. Tingkat Internasional</p> <p>7. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara missal/kampanye dalam bentuk: a. Ceramah umum: 1). Tingkat Nasional 2). Tingkat Internasional b. Melaksanakan kegiatan Pameran kehutanan: 1). Tingkat propinsi - Sebagai pramuwicara 2). Tingkat nasional - Sebagai pembuat Karya/desain - Sebagai pramuwicara</p> <p>8. Melakukan penyuluhan melalui siaran radio/tv: a. Sebagai suhradara b. Sebagai nara sumber/ pengisi acara diskusi/wawancara</p>	<p>Setiap kali</p> <p>Setiap kali</p> <p>Setiap kali</p> <p>Setiap kali</p> <p>Setiap laporan</p> <p>Setiap laporan</p> <p>Setiap Laporan</p> <p>Setiap kali pameran</p> <p>Setiap kali pameran</p> <p>Setiap kali pameran</p> <p>Setiap kali</p> <p>Setiap kali</p>	<p>0.09</p> <p>0.18</p> <p>0.08</p> <p>0.16</p> <p>0.16</p> <p>1.80</p> <p>0.06</p> <p>0.18</p> <p>0.08</p> <p>0.24</p> <p>0.10</p> <p>0.59</p> <p>0.18</p>	<p>PK Pertama</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK muda</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p>

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
			<p>9. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada:</p> <p>a. perorangan oleh:</p> <p>1) Penyuluh Kehutanan pertama</p> <p>2) Penyuluh Kehutanan Muda</p> <p>3) Penyuluh Kehutanan Madya</p> <p>b. Kelompok sasaran lain oleh:</p> <p>1) Penyuluh Kehutanan Pertama</p> <p>2) Penyuluh Kehutanan Muda</p> <p>3) Penyuluh Kehutanan Madya</p> <p>10. Memberikan bimbingan teknis/kursus kepada kelompok sasaran sebagai:</p> <p>a. Menyusun materi Kursus</p> <p>1. mendorong pembentukan organisasi kelompok sasaran:</p> <p>a. Menumbuhkan gabungan kelompok/asosiasi</p> <p>b. Menumbuhkan koperasi/kelembagaan formal (badan hokum)</p> <p>2. Menumbuhkan kemiraan usaha kelompok sasaran dengan perusahaan</p> <p>3. Berperan serta dalam perlombaan keterampilan bkehutanan sebagai berikut:</p> <p>a. Penyusunan pedoman penilaian lomba</p>	<p>Setiap orang</p> <p>Setiap orang</p> <p>Setiap kelompok</p> <p>Setiap kelompok</p> <p>Setiap kelompok</p> <p>Setiap modul</p> <p>Setiap kelompok</p> <p>Setiap kelompok</p> <p>Setiap pksu perusahaan</p> <p>Setiap pedoman</p>	<p>0.03</p> <p>0.06</p> <p>0.09</p> <p>0.04</p> <p>0.08</p> <p>0.12</p> <p>0.44</p> <p>0.09</p> <p>0.21</p> <p>0.27</p> <p>0.60</p>	<p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p> <p>PK pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Muda</p> <p>PK pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p>
IV	<p>Pemantauan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan</p>	<p>C. Pengembangan swadaya dan swakarya kelompok sasaran</p> <p>A. Memantau pelaksanaan penyuluhan kehutanan</p> <p>B. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan</p>	<p>1. Menyusun metode/teknik penantiauan/pengendalian</p> <p>1. Mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan</p>	<p>Setiap naskah</p> <p>Setiap kali</p>	<p>0.38</p> <p>0.08</p>	<p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p>

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
			<p>b. Sebagai narasumber/pengisi acara diskusi/wawancara</p> <p>c. Sebagai pembahas</p> <p>2. Merumuskan hasil diskusi dan penyempurnaan laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan</p>	<p>Setiap kali</p> <p>Setiap kali</p> <p>Setiap laporan</p>	<p>0.12</p> <p>0.08</p> <p>0.14</p>	<p>PK Madya</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Muda</p>
			<p>1. Menyusun laporan pejabat fungsional penyuluh kehutanan:</p> <p>a. Bulanan</p> <p>a. Penyuluh Kehutanan Pertama</p> <p>b. Penyuluh Kehutanan Muda</p> <p>c. Penyuluh Kehutanan madya</p> <p>b. Triwulan</p> <p>a. Penyuluh kehutanan Pertama</p> <p>b. Penyuluh Kehutanan Muda</p> <p>c. Penyuluh Kehutanan Madya</p> <p>b. Penyuluh Kehutanan Muda</p> <p>c. Penyuluh Kehutanan Madya</p>	<p>Setiap laporan</p> <p>Setiap laporan</p> <p>Setiap laporan</p> <p>Setiap laporan</p> <p>Setiap Laporan</p> <p>Setiap konsep</p>	<p>0.04</p> <p>0.08</p> <p>0.12</p> <p>0.06</p> <p>0.12</p> <p>0.18</p> <p>0.30</p> <p>0.45</p> <p>0.45</p>	<p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Pertama</p>
V	Pengembangan penyuluhan kehutanan	<p>A. Pengembangan aspek kelembagaan/manajemen penyuluhan kehutanan</p>	<p>1. pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan:</p> <p>a. Menyiapkan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan</p> <p>b. Mendiskusikan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan</p> <p>c. Menyempurnakan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan</p> <p>2. Pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan ;</p> <p>a. menyiapkan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan</p> <p>b. Mendiskusikan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan</p> <p>c. Menyempurnakan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan</p>	<p>Setiap laporan</p> <p>Setiap naskah rumusan</p> <p>Setiap konsep</p> <p>Setiap laporan</p> <p>Setiap naskah rumusan</p>	<p>0.42</p> <p>0.69</p> <p>0.40</p> <p>0.46</p> <p>0.90</p>	<p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p>

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
			<p>3. Pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan :</p> <p>a. menyiapkan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan</p> <p>b. Mendiskusikan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan</p> <p>c. Menyempurnakan konsep pengembangan Perencanaan penyuluhan kehutanan</p> <p>1. Pengembangan system monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan</p> <p>a. Menyiapkan konsep pengembangan system monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan</p> <p>b. Mendiskusikan konsep pengembangan system monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan</p> <p>c. Menyempurnakan konsep pengembangan system monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan</p> <p>1. Menyusun rancangan pengembangan teknik/metodologi, materi, sarana, dan alat Bantu penyuluhan kehutanan</p>	<p>Setiap konsep</p> <p>Setiap laporan</p> <p>Setiap naskah rumusan</p> <p>Setiap konsep</p> <p>Setiap laporan</p> <p>Setiap naskah rumusan</p> <p>Setiap konsep</p>	<p>0.50</p> <p>0.95</p> <p>1.08</p> <p>0.36</p> <p>0.80</p> <p>1.20</p> <p>0.37</p>	<p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK madya</p> <p>PK Pertama</p>
			<p>B. Pengembangan aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat Bantu penyuluhan kehutanan</p>			

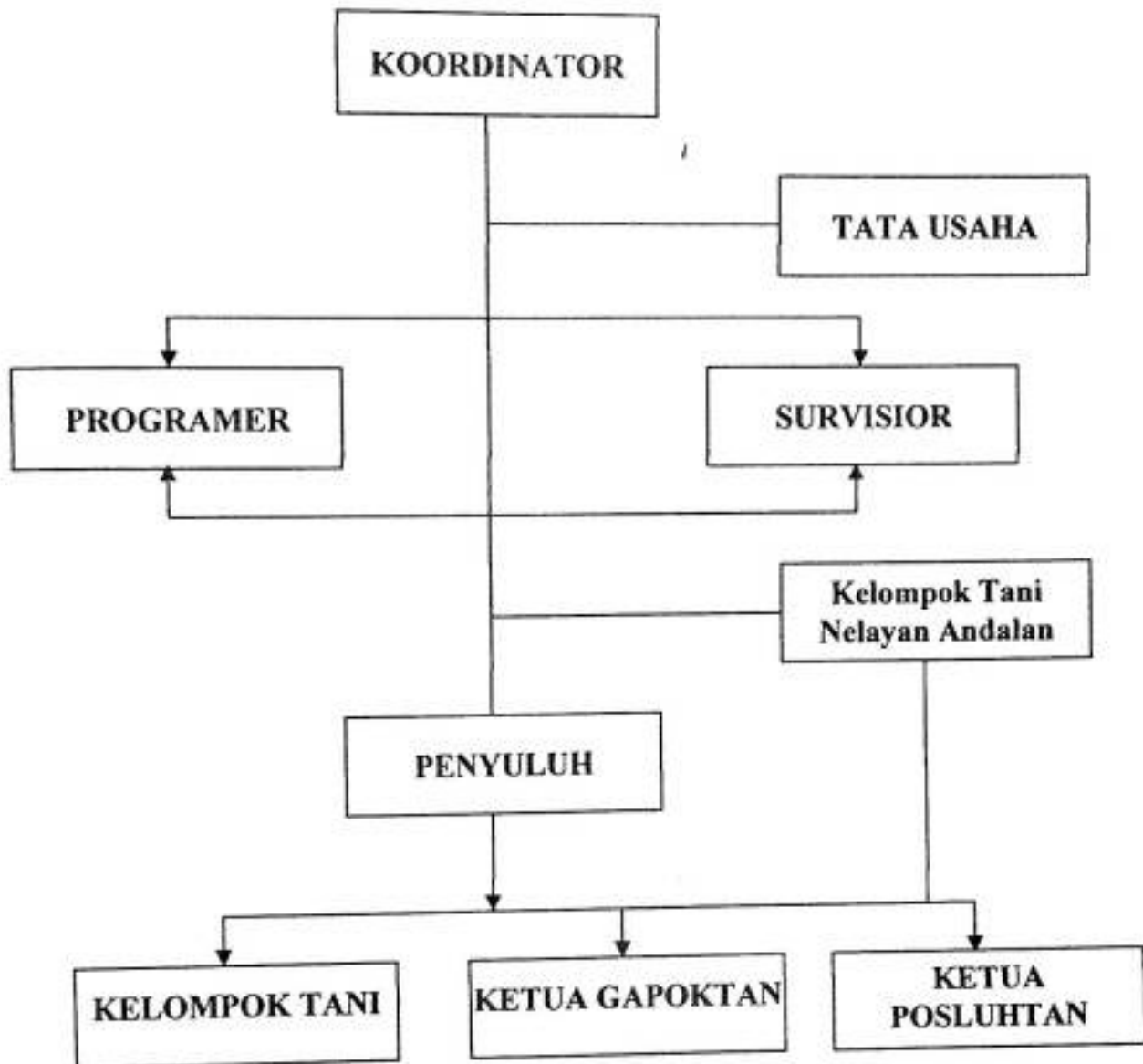
No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
			<p>2. Mendiskusikan konsep pengembangan teknik/metodologi, materi, sarana dan alat Bantu Penyuluhan kehutanan</p> <p>3. Menyempurnakan pengembangan teknik/metodologi, materi, sarana, dan alat Bantu penyuluhan kehutanan</p>	Setiap laporan	0.84	PK Muda
			<p>1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survey di bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIP</p> <p>2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIP</p> <p>3. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah</p> <p>4. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah</p>	Setiap naskah rumusan Setiap buku Setiap naskah	0.72 12.50 6.00	PK Madya Semua jenjang Semua jenjang
VI	Pengembangan profesi	A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan				

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		B. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan Kehutanan C. merumuskan system penyuluhan kehutanan	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan	Setiap karya	5.00	Semua jenjang
		D. Membuat buku pedoman/petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan	1. Merumuskan system penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan 2. Merumuskan system penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai-nilai	Tiap rumusan	2.50	Semua jenjang
		A. Mengajar/melatih dibidang penyuluhan kehutanan B. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan kehutanan	Membuat buku pedoman/petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan kehutanan 1. Terjemahan/saduran di bidang kehutanan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah yang diakui oleh lembaga ilmu pengetahuan Indonesia 2. Terjemahan/saduran di bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah 3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	Setiap buku petunjuk	2.00	Semua jenjang
VII	Penunjang penyuluhan kehutanan			Setiap 2 jam pelajaran	0.04	Semua jenjang
				Setiap buku	7.00	Semua jenjang
				Setiap naskah	3.50	Semua jenjang
				Setiap buku	3.00	Semua jenjang
				Setiap makalah	1.50	Semua jenjang
				Setiap naskah	1.50	Semua jenjang

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		C. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang penyuluhan kehutanan	1. mengikuti seminar/lokakarya atau symposium sebagai: a. Perasaran b. Moderator c. Pembahas d. Narasumber e. Peserta	Setiap kegiatan	3.00	Semua jenjang
		D. Menjadi anggota tim penilai jabatan penyuluhan	Menjadi anggota Tim Penilai jabatan penyuluhan kehutanan	Setiap tahun	0.50	Semua jenjang
		E. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar sarjana yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya 1. Sarjana/DIV 2. Pasca sarjana 3. Doktor	Setiap gelar	5.00	Semua jenjang
		F. Menjadi anggota organisasi profesi di bidang penyuluhan	1. Tingkat nasional/internasional, sebagai: a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Setiap tahun	1.00	Semua jenjang
		G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya 1. Diploma II 2. Sarjana Muda/Diploma III 3. Sarjana/Diploma IV	Setiap gelar	0.50	Semua jenjang
				Setiap gelar	3.00	Semua jenjang
				Setiap gelar	4.00	Semua jenjang
				Setiap gelar	5.00	Semua jenjang

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		H. Menjadi anggota organisasi profesi di bidang penyuluhan kehutanan	1. tingkat nasional/internasional sebagai: a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Setiap tahun Setiap tahun	1.00 0.50	Semua jenjang Semua jenjang
		I. Memperoleh piagam kehormatan	2. Tingkat propinsi sebagai: a. pengurus aktif b. anggota aktif	Setiap tahun Setiap tahun	0.50 0.35	Semua jenjang Semua jenjang
			1. tunda kehormatan satyalencana karya saya: a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Setiap piagam Setiap piagam Setiap piagam	3.00 2.00 1.00	Semua jenjang Semua Semua jenjang
			2. Gelar kehormatan akademis	Setiap gelar	15.00	Semua jenjang

Lampiran 8. Bagan Struktur BPP Tompobulu, Kabupaten Maros



Lampiran 9 : Quisioner

Jati diri responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pendidikan :
4. Agama :
4. Jabatan :
5. Pangkat/Golongan :

Pertanyaan :

1. Berapa jumlah penyuluh kehutanan di dinas Kehutanan ini ?
2. Dalam menyusun program penyuluhan, apa ada survey awal dalam menentukan metode yang digunakan dalam menentukan pola penyuluhan pada kelompok masyarakat ?
3. Apakah masyarakat terlibat dalam penyusunan pola atau model penyuluhan? Dan kalau iya sejauh mana masyarakat ikut terlibat ?
4. Selama ini dalam menyuluh apakah bapak/ibu terlibat langsung dalam aktivitas masyarakat pada kegiatan yang disuluhkan atau hanya sekedar menyampaikan ?
5. Setelah melakukan penyuluhan apakah bapak/ibu melakukan pemantaun kelapangan atau kelompok tani? Kalau ya berapa kali intensitas kegiatannya? kalau tidak alasannya

6. Model penyuluhan yang paling efektif menurut bapak/ibu dipakai dalam penyuluhan di masyarakat atau di kelompok tani?
7. Indikator yang digunakan dalam menentukan tingkat keberhasilan pola atau metode penyuluhan yang bapak/ibu gunakan pada kelompok tani atau masyarakat ?
8. Sejauh mana respon masyarakat jika bapak/ibu melakukan penyuluhan ?
9. Sejauh ini dari penyuluhan yang dilakukan apa ada hasil yang nampak pada kelompok masyarakat? (Ya/Tidak)
10. Kendala apa yang dihadapi dalam penyuluhan pada kelompok tani atau masyarakat ?